




**BAB
2**

AKUNTABILITAS KINERJA



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan tersebut menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disesuaikan dengan dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, RKT Tahun 2023, RKPD Tahun 2023, dan PK Tahun 2023. Pengukuran kinerja dalam laporan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya.



Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.



3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian indikator kinerja utama Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 sebagai berikut,

1. Misi 1 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

TUJUAN 1.1 :

Mewujudkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan 1.1 : *Mewujudkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan*

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA Th. 2021	REALISASI KINERJA Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	60,96	58,63	59,32	59,72	100,67	59,32	100,67
Indek Resiko Bencana	108,03	108,03	108,03	91,51	118,05	108,03	118,05
Indek Kualitas Lingkungan Hidup	64,04	63,22	63,22	65,93	104,29	63,22	104,29
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					107,67		107,67

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023



Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 1.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan 1.1

Capaian kinerja rata-rata tujuan 1.1 Tahun 2023 adalah sebesar 107,67% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi.”

2. Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU **Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah** tahun 2023 sebesar 100,67% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi.”

b. Angka capaian kinerja IKU **Indeks Resiko Bencana** tahun 2023 sebesar 118,05% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi.”

c. Angka capaian kinerja IKU **Indeks Lingkungan Hidup** tahun 2023 sebesar 104,29% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi.”

3. Analisis Pencapaian Kinerja Tujuan

a. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah

Capaian Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah merupakan rata-rata dari hasil capaian Presentase Kawasan Kumuh, Presentase Penggunaan Lahan Sesuai Peruntukan, Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan, perdagangan. Realisasi Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah tahun 2023 sebesar 59,72% melebihi target yang ditetapkan yaitu 59,32%. Capaian tahun 2023 ini juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 sebesar 58,63%.

b. Indeks Risiko Bencana

Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 adalah sebesar 91,51 dari yang ditargetkan sebesar 108,03 dengan capaian kinerja sebesar 118,05%. Capaian ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yaitu 100%. Realisasi kinerja indeks risiko bencana tahun 2023 sebesar 91,51 dari target 108,03 dengan capaian sebesar 118,05% disebabkan oleh meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sehingga resiko bencananya berkurang.



c. **Indek Kualitas Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 tercapai dari hasil akumulasi perhitungan 0,36 Indeks Kualitas Air (IKA) ditambah 0,405 dari Indeks Kualitas Udara (IKU) ditambah 0,219 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Rumusan perhitungan tersebut berdasarkan dari ketentuan pada Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024.

Tahun 2023, diperoleh capaian Indeks Kualitas Air 53,68, Indeks Kualitas Udara 84,37 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 52,85.

Secara keseluruhan dan berdasarkan perhitungan dari rumusan hitung yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai IKLH tahun 2023 melebihi target yang telah ditentukan dalam Perubahan RENSTRA Tahun 2018-2023, yaitu sebesar 65,93, dimana target IKLH tahun 2023 sebesar 63,22.

Dalam pencapaian Tujuan 1.1 didukung sasaran sebagai berikut :

- 1.1.1 Meningkatnya permukiman yang tertata.
- 1.1.2 Meningkatnya infrastruktur pelayanan publik.
- 1.1.3 Meningkatnya infrastruktur pendukung perekonomian daerah.
- 1.1.4 Meningkatnya Mitigasi dan Penanganan Bencana.
- 1.1.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Tabel 3.3
Sasaran 1.1.1 : *Meningkatnya permukiman yang tertata*

INDIKATOR SASARAN	REALISASI SASARAN Th. 2021	REALISASI SASARAN Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN SASARAN Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Persentase Kawasan Kumuh	0,39	0,55	0,39	0,39	100	0,39	100



Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan	81,40	82	83	83	100	83	100
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					100		100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1.1.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran 1.1.1

Capaian kinerja rata-rata sasaran 1.1.1 Tahun 2023 adalah sebesar 100% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

2. Capaian kinerja IKU

- a. Angka capaian kinerja IKU Presentase Kawasan Kumuh tahun 2023 adalah sebesar 100% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
- b. Angka capaian kinerja IKU Presentase Penggunaan Lahan sesuai peruntukan tahun 2023 sebesar 100% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

1) Prosentase Kawasan Kumuh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Maka pada tanggal 23 Mei 2019 diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.



Tabel 3.4
Perhitungan Pengurangan permukiman kumuh Kabupaten Karanganyar
Tahun 2023

No	Kelurahan/Desa	Luas Kumuh sesuai SK kumuh 2020	Pengurangan	Pengurangan	Pengurangan	Pengurangan	Jumlah Luas Capaian Penanganan sampai 2022
			Luasan Kumuh 2020	Luasan Kumuh 2021	Luasan Kumuh 2022	Luasan Kumuh 2023	
1	2	3	7	8	9	10	11
1	Bolon	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Gedongan		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Ngasem	10.38	5.67	0.00	0.00	0.00	5.67
4	Brujul	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Jaten	5.43	4.56	0.00	0.00	0.00	4.56
6	Jati		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Ngringo	7.3	0.00	3.12	0.00	0.00	3.12
8	Delingan	10	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
9	Gayamdompo		2.57	0.00	0.00	0.00	2.57
10	Gedong	7	2.74	0.00	0.00	0.00	2.74
11	Karanganyar		3.07	0.00	0.00	0.00	3.07
12	Lalung	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Popongan		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Banjarharjo		7.25	2.12	0.00	0.00	9.37
15	Kaliwuluh	17.34	0.02	2.20	0.00	3.00	5.22
16	Kemiri	10	8.16	0.12	2.00	0.00	10.28
17	Malangaten		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Pulosari	3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Kaling	4.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Karangmojo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Pandeyan	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Tawangmangu	4.06	2.02	0.00	4.06	0.00	6.08
23	Kalisoro	2.37	0.02	0.00	0.37	0.00	0.39
24	Nangsri	6.8	0.00	0.00	0.00	6.80	6.80
25	Alastuwo	6.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		107.24	36.07	7.56	6.43	11.80	61.86

Luas kumuh sesuai SK 2020 : 107,24 (Ha)

Capaian penanganan sampai dengan th. 2023 (Ha) : 61,86 (Ha)

Sisa luas kawasan kumuh : 45,38 (Ha)

Presentase kawasan kumuh : $\frac{\text{Sisa luas kumuh}}{\text{Luas kawasan kumuh}} \times 100$
: $\frac{45,38}{11635,90} \times 100\%$
: **0.39%**



Semakin rendah persentase kawasan kumuhnya menunjukkan bahwa semakin sedikit pula kawasan kumuhnya dalam suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh. Tahapan pelaksanaan awal adalah melakukan pendataan kondisi awal (*baseline*) 7 Indikator Kumuh di desa/kelurahan masing-masing. Data tersebut diintegrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk menentukan kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru, yang nantinya akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain, yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan secara bersama, termasuk kegiatan mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar permukiman yang berfokus pada penanganan kumuh. Kontribusi pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun swadaya masyarakat, yang akan menjadi satu kesatuan pembiayaan demi mencapai target peningkatan kualitas penanganan kumuh yang diharapkan. Untuk mendukung perwujudan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan yaitu memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah. Adapun faktor yang mendukung penanganan permukiman kumuh antara lain pengembangan kelembagaan, strategi, dan kebijakan, pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk dukungan untuk perencanaan penanganan permukiman kumuh yang



terintegrasi, pendanaan investasi infrastruktur dan pelayanan perkotaan, meliputi infrastruktur skala kawasan dan skala kabupaten/kota termasuk dukungan pusat pengembangan usaha dan infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan penghidupan berkelanjutan, dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis, dukungan program/kegiatan lainnya, termasuk dukungan untuk kondisi darurat bencana.

2) Presentase Penggunaan Lahan sesuai peruntukan

Penggunaan lahan sesuai peruntukan adalah bentangan lahan yang sesuai peruntukannya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan. ***Meningkatnya prosentase penggunaan lahan sesuai peruntukan menunjukkan bahwa jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan semakin meningkat.***

Pada tahun 2023 pengajuan permohonan ijin pemanfaatan ruang di Kabupaten Karanganyar sejumlah 150 yang disetujui dan yang tidak disetujui 31. Perhitungan persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan berdasarkan pengajuan ijin yang masuk adalah sebagai berikut :

TOTAL PENGAJUAN	DISETUJUI	DITOLAK
181	150	31

Keterangan:

Total pengajuan yang disetujui = 150

Total pengajuan yang ditolak = 31

Total pengajuan = 181

Persentase penggunaan

lahan sesuai peruntukan = $\frac{\text{Total Pengajuan Yang Disetujui}}{\text{Total Pengajuan}} \times 100\%$
 = $\frac{150}{181} \times 100\%$
 = **83 %**



Tabel 3.5
Sasaran 1.1.2 : Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik

INDIKATOR SASARAN	REALISASI SASARAN Th. 2021	REALISASI SASARAN Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN SASARAN Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemerintahan	76,35	76	77	78	101,3	77	101,3
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					101,3		101,3

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1.1.2 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran 1.1.2

Capaian kinerja rata-rata sasaran 1.1.2 Tahun 2023 adalah sebesar 101,3% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi.”

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemerintahan tahun 2023 adalah sebesar 101,3% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Pada tahun 2023 pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pemerintahan di Kabupaten Karanganyar yang dibangun, ditingkatkan maupun yang dipelihara sejumlah 3.330 dari total 4.270 bangunan. Perhitungan realisasi



cakupan tingkat pembangunan pendidikan, kesehatan dan pemerintahan adalah sebagai berikut :

INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEMERINTAHAN	INFRASTRUKTUR YANG DIBANGUN, DITINGKATKAN, DIPELIHARANA	INFRASTRUKTUR YANG TIDAK DITINGKATKAN
4270	3330	1015

Keterangan:

Total Infrastruktur Yang Dibangun Ditingkatkan Dipeliharana = 3330

Total Infrastruktur Yang Tidak Ditingkatkan = 940

Total Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Pemerintahan = 4270

$$\begin{aligned}
 \text{Cakupan Tingkat} &= \frac{\text{Total Infrastruktur Yang Dibangun Ditingkatkan}}{\text{Total Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Pemerintahan}} \times 100\% \\
 \text{Pembangunan Infrastruktur} &= \frac{3330}{4270} \\
 \text{Pendidikan, Kesehatan,} &= 78\% \\
 \text{Pemerintahan} &
 \end{aligned}$$

Bangunan gedung pemeritahan yang berkualitas sesuai dengan fungsinya, andal, serasi, selaras dengan lingkungannya selamat, sehat, nyaman, dan memberikan kemudahan bagi penghuni dan/atau pengguna bangunan gedung, serta efisien, serasi, dan selaras dengan lingkungannya diperlukan perencanaan suatu konstruksi bangunan yang baik, diperlukan pula landasan dan analisa struktur yang berpedoman pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Perencanaan dari suatu konstruksi bangunan gedung juga harus memenuhi persyaratan struktur bangunan gedung yang telah ditentukan, yakni kuat, kokoh dan stabil dalam memikul beban. Selain itu, terdapat persyaratan lain di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Setiap bangunan gedung, strukturnya haruslah memenuhi persyaratan keselamatan (*safety*) dan persyaratan kelayanan (*serviceability*) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
2. Setiap bangunan gedung haruslah memiliki kemampuan memikul beban yang telah diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa, pengaruh korosi, jamur, maupun serangga perusak struktur bangunan gedung.



3. Dalam perencanaan struktur bangunan gedung terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan gedung baik dari sub struktur maupun struktur gedung haruslah diperhitungkan dalam memikul Gempa Rencana sesuai dengan zona gempanya.
4. Struktur bangunan gedung harus direncanakan secara detail sehingga pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan tidak terjadi keruntuhan dan masih dapat memungkinkan pengguna maupun pengunjung bangunan gedung untuk menyelamatkan diri.
5. Apabila bangunan gedung terletak pada lokasi tanah yang dapat terjadi fluktuasi, maka struktur bawah bangunan gedung harus direncanakan mampu menahan gaya likuifaksi tanah tersebut.
6. Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan gedung secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam pedoman/petunjuk teknis tata cara pemeriksaan keandalan bangunan gedung.
7. Perbaikan atau penguatan struktur bangunan gedung harus segera dilakukan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan keandalan bangunan gedung yang dilakukan oleh pengkaji teknis bangunan gedung maupun konsultan terkait sehingga bangunan gedung selalu memenuhi persyaratan keselamatan struktur.
8. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan struktur bangunan gedung seperti halnya penambahan struktur dan/atau penggantian struktur harus mempertimbangkan persyaratan keselamatan struktur sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku.
9. Pembongkaran bangunan gedung dilakukan apabila bangunan gedung sudah tidak laik fungsi dan membahayakan pengguna maupun orang lain. Setiap pembongkaran bangunan gedung yang dilakukan juga harus dilaksanakan secara tertib dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat beserta lingkungannya.
10. Pemeriksaan keandalan bangunan gedung dilaksanakan secara berkala sesuai klasifikasi bangunan dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bidang yang sesuai.

Untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak diharapkan, pemeriksaan keandalan bangunan gedung pemerintahan harus dilakukan secara berkala. Pemeriksaan keandalan bangunan tersebut ditujukan untuk menjamin



bangunan gedung tetap memenuhi kriteria laik fungsi sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Untuk meminimalkan risiko kegagalan struktur bangunan gedung, maka diperlukan adanya suatu metode pemeriksaan keandalan bangunan gedung. Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menegaskan bahwa setiap bangunan publik harus sudah mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF). SLF atau Sertifikat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai IMB dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan berdasar hasil pemeriksaan dari instansi maupun penyedia jasa/konsultan SLF.

Tabel 3.6

Sasaran 1.1.3 : Meningkatkan infrastruktur pendukung perekonomian daerah

INDIKATOR SASARAN	REALISASI SASARAN Th. 2021	REALISASI SASARAN Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN SASARAN Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan, perdagangan	78,42	76	77	77,5	100,65	77	100,65
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					100,65		100,65

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1.1.3 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran 1.1.3

Capaian kinerja rata-rata sasaran 1.1.3 Tahun 2023 adalah sebesar 100,65% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi.”



2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemerintahan tahun 2023 adalah sebesar 100,65% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Pada tahun 2023 pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan, perdagangan di Kabupaten Karanganyar yang dibangun, ditingkatkan maupun yang dipelihara sejumlah 2188 dari total 2822 aset jalan, irigasi, perhubungan, perdagangan. Perhitungan realisasi cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan, perdagangan adalah sebagai berikut :

Infrastruktur Jalan, Irigasi, Perhubungan Dan Perdagangan	Infrastruktur Yang Dibangun, Ditingkatkan, Dipeliharana	Infrastruktur Yang Tidak Ditingkatkan
2822	2188	636

Keterangan:

Total infrastruktur yang dibangun ditingkatkan dipelihara = 2188

Total infrastruktur yang tidak ditingkatkan = 636

Total infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan dan perdagangan = 2822

$$\begin{aligned}
 \text{Cakupan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan dan perdagangan} &= \frac{\text{Total infrastruktur yang dibangun ditingkatkan dipelihara}}{\text{Total infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan dan perdagangan}} \times 100\% \\
 &= \frac{2188}{2822} \\
 &= \mathbf{77,5\%}
 \end{aligned}$$



Capaian untuk tingkat kemantapan jalan ditahun 2023 adalah 83 % angka ini belum bisa memenuhi target yang dtargetkan RPJMD sebesar 88% dikarenakan :

1. Terjadinya cuaca ekstrem yang mengakibatkan kerusakan jalan cukup signifikan
2. Penanganan di tahun sebelumnya belum tuntas sehingga luasan kerusakan jalan semakin luas
3. Penanganan pandemi covid sehingga anggaran untuk pemeliharaan jalan di tahun 2021,2022 dan 2023 terbatas

Capaian pembangunan infrastruktur irigasi di tahun 2023 adalah 72% angka ini didapat dari panjang irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2023 sehingga tersebut sudah dapat memenuhi target akhir RPJMD yaitu 72% mengingat masih terbatasnya anggaran untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi .

Sasaran utama pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan, perdagangan di Kabupaten Karanganyar adalah guna meningkatkan sarana prasarana daerah yang memadai. Kegiatan yang diperlukan untuk menjadikan sarana dan prasarana daerah meningkat setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Pemeliharaan rutin infrastruktur adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi dengan kondisi pelayanan mantap. Contoh pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan pemeliharaan/pembersihan bahu jalan, Pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah), Pemeliharaan/pembersihan rumaja, Pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumija, Pengisian celah/retak permukaan (*sealing*), Laburan aspal, Penambalan lubang, Pemeliharaan bangunan pelengkap, Pemeliharaan perlengkapan jalan dan (*Grading operation / Reshaping*) atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

Pemeliharaan berkala infrastruktur adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi infrastruktur dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Contoh



pemeliharaan berkala meliputi kegiatan pelapisan ulang (*overlay*), Perbaikan bahu jalan, Pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/preventive yang meliputi antara lain *fog seal*, *chip seal*, *slurry seal*, *micro seal*, *strain alleviating membrane interlayer* (SAMI), Pengasaran permukaan (*regrooving*), Pengisian celah/retak permukaan (*sealing*), Perbaikan bangunan pelengkap, Penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak, Pemarkaan (*marking*) ulang, Penambalan lubang, Untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (*ripping and reworking existing layers*) pada saat pembentukan kembali permukaan.

Rehabilitasi infrastruktur adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu bagian dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Contoh Rehabilitasi jalan meliputi kegiatan :Pelapisan ulang, Perbaikan bahu jalan, Perbaikan bangunan pelengkap, Perbaikan/penggantian perlengkapan jalan, Penambalan lubang, Penggantian *dowel/tie bar* pada perkerasan kaku (*rigid pavement*), Penanganan tanggap darurat, Pekerjaan galian, Pekerjaan timbunan, Penyiapan tanah dasar, Pekerjaan struktur perkerasan, Perbaikan/pembuatan drainase, Pemarkaan, Pengkerikilan kembali (*regraveling*) untuk perkerasan jalan tidak berpenutup dan jalan tanpa perkerasan.

Rekonstruksi infrastruktur adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian infrastruktur yang dalam kondisi rusak berat agar bagian tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan atau Contoh kegiatan rekonstruksi sebagaimana dilakukan secara setempat meliputi kegiatan perbaikan seluruh struktur perkerasan, drainase, bahu jalan, tebing, dan talud, Peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan bahu jalan sesuai umur rencananya kembali, Perbaikan perlengkapan jalan, Perbaikan bangunan pelengkap.

Peningkatan infrastruktur merupakan penanganan guna peningkatan struktural dan atau geometriknnya agar mencapai tingkat pelayanan yang direncanakan atau dengan kata lain, peningkatan infrastruktur dilakukan untuk memperbaiki kondisi dengan kemampuan tidak mantap atau kritis menjadi infratraktur dengan kondisi mantap. Contoh pekerjaan peningkatan jalan terdiri atas peningkatan struktur merupakan kegiatan penanganan untuk dapat



meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas-ruas jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan, Peningkatan kapasitas merupakan kegiatan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur.

Pembangunan konstruksi baru adalah penanganan jalan dari kondisi belum tersedianya infratraktur sampai kondisi infrastruktur dapat berfungsi. Pekerjaan konstruksi baru juga berarti pekerjaan membangun infrastruktur baru yang mempunyai tahapan dimulai dari tahap perencanaan (*planning*), selanjutnya dilakukan studi kelayakan (*feasibility study*) dan perancangan detail design, kemudian tahap konstruksi (*construction*) dan diakhiri tahap pemeliharaan (*maintenance*).

Tabel 3.7
Sasaran 1.1.4 : Meningkatkan Mitigasi dan Penanganan Bencana

INDIKATOR SASARAN	REALISASI SASARAN Th. 2021	REALISASI SASARAN Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN SASARAN Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Persentase Berkurangnya korban bencana alam	0,06	0,12	0,05	0,0015	33,33	0,05	33,33
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					33,33		33,33

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1.1.4 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran 1.1.4
Capaian kinerja rata-rata sasaran 1.1.4 tahun 2023 adalah sebesar 33,33% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Rendah”



2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Persentase Berkurangnya korban bencana alam tahun 2023 sebesar 33,33% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Rendah”.

3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Pada tahun 2023 realisasi presentase berkurangnya bencana alam sebesar 0,0015%, menurun jika dibandingkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,12% dan dari target yang ditetapkan sebesar 0,05%.

Realisasi tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan terjadinya bencana alam yang tidak terduga. Termasuk kekeringan panjang yang tahun ini melanda Kabupaten Karanganyar.

Tabel 3.8
Sasaran 1.1.5 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

INDIKATOR SASARAN	REALISASI SASARAN Th. 2021	REALISASI SASARAN Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN SASARAN Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Indek Kualitas Udara (IKU)	72,36	80,71	80,71	84,37	104,53	80,71	104,53
Indek Kualitas Air (IKA)	56,67	55,71	55,71	53,68	96,36	55,71	96,36
Indek Kualitas Tutupan (IKTL)	63,33	43,79	43,79	52,85	120,69	43,79	120,69
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					107,19		107,19

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1.1.5. sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran 1.1.5.

Capaian kinerja rata-rata sasaran 1.1.5 Tahun 2023 adalah sebesar 107,19% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Indek Kualitas Udara tahun 2023 sebesar 104,53% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.



Angka capaian kinerja IKU Indek Kualitas Air tahun 2023 sebesar 96,36% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

Angka capaian kinerja IKU Indek Kualitas Tutupan Lahan tahun 2023 sebesar 120,69% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Indikator Sasaran 1.1.6. terdiri dari indeks kualitas udara, indeks kualitas air dan indek kualitas tutupan lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 tercapai dari hasil akumulasi perhitungan 0,36 Indeks Kualitas Air (IKA) ditambah 0,405 dari Indeks Kualitas Udara (IKU) ditambah 0,219 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Rumusan perhitungan tersebut berdasarkan dari ketentuan pada Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024.

Tahun 2023, diperoleh capaian Indeks Kualitas Air 53,68, Indeks Kualitas Udara 84,37 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 52,85.

Berdasarkan Tabel 3.8 di atas, Indeks Kualitas Air lebih rendah dari target yaitu sebesar 53,68 dari target yang ditetapkan sebesar 55,71 dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan hasil analisa untuk 15 sampel titik air sungai dan waduk ada beberapa parameter yang melebihi baku mutu (BOD, TSS) sehingga perhitungan indeks kualitas air di bawah target capaian atau turun dari capaian tahun sebelumnya. Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 84,37 dari target yang ditetapkan sebesar 80,71. Hal ini dikarenakan kualitas udara pada titik pengambilan sampel (kawasan pemukiman, perkantoran, industri, padat transportasi) masih baik dan di atas parameter baku mutu.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 52,85 dari target yang ditetapkan sebesar 43,79. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, Indeks Kualitas Tutupan Lahan mengalami kenaikan, ini dikarenakan kualitas lahan di Karanganyar masih banyak tutupan vegetasi dan area yang representative untuk ruang terbuka hijau.



Secara keseluruhan dan berdasarkan perhitungan dari rumusan hitung yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai IKLH tahun 2023 sebesar 65,93. Angka ini melebihi target yang telah ditentukan, baik target dalam Perjanjian Kinerja (63,22) maupun dalam Perubahan RENSTRA Tahun 2018-2023 (58,24).

Indikator kinerja untuk indeks kualitas air pada tahun 2023 yaitu sebesar 96,36%, masuk pada kriteria **Baik (75-100%)**, *Permendagri No.54 Th.2010*.

Indikator kinerja untuk indeks kualitas udara pada tahun 2023 sebesar 104,53 %, termasuk dalam kriteria **Sangat Baik (> 100%)**, *Permendagri No.54 Th.2010*.

Indikator kinerja untuk indeks kualitas tutupan lahan tahun 2023 sebesar 120,69 %, termasuk dalam kriteria **Sangat Baik (> 100%)**, *Permendagri No.54 Th.2010*.

Indikator kinerja untuk IKLH tahun 2023 tercapai pada skala pengukuran ordinal capaian kinerja lebih dari 100%, yaitu sebesar 104,29% sehingga termasuk dalam kriteria **Sangat Baik (> 100%)**, *Permendagri No.54 Th.2010*.

Adanya IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) melebihi target, artinya kualitas lingkungan hidup di Karanganyar masih dalam kriteria sedang, artinya masih terjaga kualitasnya.

4. Efisiensi penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan sumber Anggaran dalam pencapaian tujuan 1.1. antara lain dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target. Berikut ini adalah tabel efisiensi penggunaan anggaran pencapaian tujuan 1.1.

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pencapaian Tujuan 1.1.

Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Efisiensi
Misi 1: Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh						
Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana	Program Penanggulangan Bencana	2.634.910.500,00	2.564.619.429,00	97,33	2,67
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.088.914.000,00	1.087.482.300,00	99,87	0,13
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.794.988.200,00	5.329.537.900,00	91,97	8,03
		Jumlah	9.518.812.700,00	8.981.639.629,00	94,36	5,64



Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Efisiensi	
	Meningkatnya pemukiman yang tertata	Program Penataan Bangunan Gedung	8.203.675.000,00	8.098.414.429,00	98,72	1,28	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	940.960.000,00	732.626.733,00	77,86	22,14	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	800.000.000,00	782.596.000,00	97,82	2,18	
		Jumlah		9.944.635.000,00	9.613.637.162,00	96,67	3,33
	Meningkatnya infrastruktur publik	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100.840.000,00	97.977.500,00	97,16	2,84	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15.292.144.000,00	14.215.446.876,00	92,96	7,04	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	9.563.927.811,00	7.832.961.799,00	81,90	18,10	
		Jumlah		24.956.911.811,00	22.146.386.175,00	88,74	11,26
	Meningkatnya infrastruktur pendukung perekonomian daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	510.000.000,00	505.595.220,00	99,14	0,86	
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	618.000.000,00	545.914.314,00	88,34	11,66	
		Jumlah		1.128.000.000,00	1.051.509.534,00	93,22	6,78
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	128.000.000,00	125.245.650,00	97,85	2,15	
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		23.000.000,00	22.997.150,00	99,99	0,01		
Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)		125.000.000,00	121.707.250,00	97,37	2,63		
Program Pengelolaan Persampahan		5.409.518.000,00	5.349.950.542,00	98,90	1,10		
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		100.000.000,00	99.984.956,00	99,98	0,02		
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		1.098.788.000,00	1.092.336.800,00	99,41	0,59		
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		23.000.000,00	19.768.900,00	85,95	14,05		
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		168.500.000,00	166.913.300,00	99,06	0,94		
Program Perencanaan Lingkungan Hidup		600.000.000,00	514.594.200,00	85,77	14,23		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		8.016.204.067,00	7.951.814.631,00	99,20	0,80		
		Jumlah		15.692.010.067,00	15.465.313.379,00	98,56	1,44

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan capaian kinerja

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian tujuan 1.1, sebagaimana tabel 3.10.



Tabel 3.10

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya pemukiman yang tertata	100	96,67	3,33
	Meningkatnya infrastruktur pelayanan publik.	101,3	88,74	11,26
	Meningkatnya infrastruktur pendukung perekonomian daerah.	100,65	93,22	6,78
	Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana	33,33	94,36	5,64
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	107,19	98,56	1,44

Berdasarkan tabel 3.10 tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan 1.1 dengan capaian kinerja sasaran rata-rata lebih dari 100%, dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.



2. Misi 2 : Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

TUJUAN 2.1 :

Meningkatnya Produktifitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.11

Tujuan 2.1 : **Meningkatnya Produktifitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA Th. 2021	REALISASI KINERJA Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	3,59	5,86	5,87-6	5.53	94,21%	5,87-6	94,21%
Tingkat Inflasi	2,58	7,03	3,0±1	3,20	93,33%	3,0±1	93,33%
PDRB Perkapita (Rp.000)	41.600	45.500	45.500	49.500	108,79%	45.500	108,79%
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,89	5,70	5,70	4,35	123,68%	5,70	123,68%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					105%		105%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 2.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan 2.1

Capaian kinerja rata-rata tujuan 2.1 tahun 2023 adalah sebesar 105% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”

2. Capaian kinerja IKU

- Angka capaian kinerja IKU Tingkat Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 sebesar 94,21% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
- Angka capaian kinerja IKU Tingkat Inflasi tahun 2023 sebesar 93,33% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
- Angka capaian kinerja IKU PDRB Perkapita (Rp.000) Tahun 2023 sebesar 108,79% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.



- d. Angka capaian kinerja IKU Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 sebesar 123,68% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
3. Analisis Pencapaian Kinerja Tujuan
 - a. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 sebesar 5,53 persen, melambat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau dari target yang ditetapkan.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023 dicapai oleh kategori jasa lainnya yang didalamnya terdiri dari jasa kesenian, hiburan dan rekreasi, jasa reparasi dan jasa swasta lainnya. Dari 17 lapangan usaha yang ada, tidak ada yang mengalami pertumbuhan negative tetapi ada 4 lapangan usaha yang mengalami perlambatan atau tumbuh lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yaitu lapangan usaha pertanian yang melambat menjadi 0,11 persen akibat el nino yang menyebabkan produksi pertanian, kehutanan dan perikanan menurun, efek dari el nino juga menyebabkan waktu tanam serta waktu panen yang mundur. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan juga melambat karena pasca covid mobilitas sudah normal kembali, jadi walaupun transportasi dan pergudangan mengalami peningkatan namun tidak sebesar tahun sebelumnya. Lapangan usaha akomodasi dan makan minum mengalami peningkatan tetapi tidak sebesar tahun lalu. Lapangan usaha terakhir yang mengalami perlambatan adalah jasa pendidikan, karena belum ada penambahan kampus/sekolah yang baru di kabupaten Karanganyar.

Lapangan usaha yang mengalami percepatan atau tumbuh lebih besar dari tahun sebelumnya adalah: lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 4.27 persen, industry pengolahan tumbuh 5.83 persen, pengadaan listrik dan gas tumbuh 6.11 persen, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang tumbuh sebesar 1.10 persen, konstruksi tumbuh sebesar 10.24 persen, perdagangan tumbuh sebesar 4.66 persen, informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5.47 persen, jasa keuangan dan asuransi tumbuh sebesar 3.63 persen, real estate tumbuh sebesar 5.70 persen, jasa perusahaan tumbuh sebesar



8.44 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tumbuh sebesar 1.73 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh sebesar 5.66 persen dan jasa lainnya mengalami kenaikan tertinggi sebesar 18.68 persen.

b. Tingkat Inflasi

Untuk Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota yang dihitung tingkat inflasinya hanya 6 kota, yaitu kota Tegal, Cilacap, Purwokerto, Surakarta, Semarang dan Kudus. Tingkat Inflasi Kabupaten Karanganyar tahun 2023 (diambil dari kota Surakarta, mengalami kenaikan dari target tertinggi yang ditetapkan sebesar 3%, dan tercapai 3,20%.

Kenaikan Inflasi ini disebabkan karena adanya kenaikan harga-harga yang ditunjukkan oleh naiknya angka Indeks Harga Konsumen (IHK). Dari 11 kelompok pengeluaran konsumsi yang dihitung IHKnya, 8 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan yaitu : kelompok makanan, minuman dan tembakau naik 0,61%, kelompok pakaian dan alas kaki naik 0,06%, kelompok perumahan, air, Listrik dan bahan bakar rumah tangga naik 0,02%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 0,14%, kelompok Kesehatan naik 0,01%, kelompok transportasi naik 0,26%, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan naik 0,19% dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik 0,26%. Sedangkan kelompok rekreasi, olah raga dan budaya, kelompok Pendidikan dan kelompok penyediaan makanan, minuman/restoran relative stabil. Komoditas yang mengalami kenaikan harga sehingga memberikan sumbangan inflasi diantaranya : cabai merah, air kemasan, bawang merah, tomat, tarif angkutan udara, gula pasir, cabai rawit, kontrak rumah dan bawang putih. Sebaliknya komoditas yang mengalami penurunan harga sehingga memberikan sumbangan deflasi antara lain : beras, daging ayam ras, buncis, bensin, papaya dan bahan bakar rumah tangga.

c. PDRB per kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar



kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 PDRB per kapita mengalami penurunan, dan kembali meningkat pada tahun 2021 yaitu sebesar 41.710 juta rupiah, pada tahun 2022 sebesar 45.500, tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 49.500 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 45.500.

Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Karanganyar, 2019-2023

No	Nilai PDRB/GRDP	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	ADHB (Juta rupiah)	37.014.752,03	37.023.453,39	39.157.212,60	43.087.760,28	47.203.554,40
2	ADHK (Juta rupiah)	26.599.744,09	26.103.228,36	27.039.607,96	28.624.989,89	30.208.236,04
PDRB per Kapita						
1	ADHB (Ribu rupiah)	41.944	39.818	41.617	45.446	49.422
2	ADHK (Ribu rupiah)	30.142	28.073	28.738	30,192	31.628
	Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita (%)	5,36	-6,86	2,37	5,06	4,76
Jumlah Penduduk (Jiwa)		882.473	929.818	940.888	948.114	955.116
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)		0,39	5,37	1,19	0,77	0,74

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar 2024

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar 2023 terdapat Pengangguran Terbuka sejumlah 23.117 orang, Angkatan kerja sejumlah 531.203 orang dan bukan Angkatan kerja 220.262 orang. Total Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja adalah 751.465 orang.

Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah Angkatan kerja sehingga diperoleh nilai TPT sebesar 4,35, artinya dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 4 – 5 orang diantaranya pencari kerja. Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat



memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan ketersediaan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.

Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 sebesar 4,35 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 5,70. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja karena semakin kecil tingkat pengangguran terbuka menunjukkan semakin sedikit pengangguran. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 5,70, capaian tahun 2023 ini mengalami peningkatan.

Dalam pencapaian Tujuan 2.1 didukung oleh sasaran sebagai berikut :

- 2.1.1 Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan
- 2.1.2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Akomodasi dan Makan Minum
- 2.1.3 Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan
- 2.1.4 Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan
- 2.1.5 Meningkatnya Nilai Investasi Daerah
- 2.1.6 Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tabel 3.12

Sasaran 2.1.1 : *Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan*

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA Th. 2021	REALISASI KINERJA Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB	13,03	12,65	16,01	12,10	75,58	16,01	75,58
Skor Pola Pangan Harapan	85,7	89,2	89,3	88,7	99,33	89,3	99,33
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					87,46		87,46

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2023 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2024



Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2.1.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Capaian kinerja sasaran 2.1.1

Capaian kinerja rata-rata sasaran 2.1.1 Tahun 2023 adalah sebesar 87,46% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”.

b. Capaian kinerja IKU

a). Angka capaian kinerja IKU Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB tahun 2023 sebesar 75,58% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”.

b). Angka capaian kinerja IKU Skor Pola Pangan Harapan tahun 2023 sebesar 99,33% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “sangat tinggi.”.

c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

1. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pada tahun 2021 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 13,03 persen, dan pada tahun 2022 memberikan kontribusi sebesar 12,65 persen dan tahun 2023 berkontribusi sebesar 12,10 persen. Terjadi penurunan sepanjang 5 tahun terakhir. Komoditi yang paling berpengaruh terhadap besaran nilai tambah pada kategori ini adalah peternakan dan tanaman pangan. Komoditi di dalamnya yang paling dominan adalah komoditi padi sawah dan ternak sapi. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini pada tahun 2023 sebesar 0,11 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2019 hingga 2023) pertumbuhan yang dicapai oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan cukup berfluktuatif, dimana pada tahun 2019 pertumbuhannya mencapai 1,80 persen sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami perlambatan menjadi 1,26 persen, pada tahun 2021 mengalami percepatan menjadi 2,16 persen, tetapi pada tahun 2021 mengalami percepatan lagi menjadi 2,85 persen dan tahun 2023 kembali melambat menjadi 0,11 persen.

2. Skors Pola Pangan Harapan

Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) sangat berkaitan dengan pola konsumsi di masyarakat. Semakin beragam menu yang dikonsumsi oleh masyarakat maka nilai PPH akan semakin tinggi. Pada tahun 2023 keragaman konsumsi tercapai 99,33%, atau belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pasca pandemi corona virus disease (COVID-19), terjadi perubahan iklim



ekstrim (el nino) dan perubahan geopolitik (Rusia - Ukraina) yang menyebabkan kenaikan harga pangan dunia. Masyarakat mensiasati kenaikan harga pangan ini dengan mengutamakan membeli/mencukupi pangan pokok, sehingga berdampak pada keragaman konsumsi pangan masyarakat yang menurun. Ditunjukkan dengan skor PPH yang menurun dari 89,2 (tahun 2022) menjadi 88,7 (tahun 2023).

Semakin tinggi tingkat keberagaman pangan, semakin tinggi pula kecukupan gizi masyarakat. Semuanya akan bermuara pada semakin tingginya kualitas sumber daya manusia. Untuk meningkatkan keberagaman konsumsi pangan, maka harus terus mengkampanyekan penyusunan menu keluarga sesuai B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman) kepada para ibu selaku penyusun menu keluarga.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pola ketahanan pangan maka ditetapkan peraturan Bupati Karanganyar Nomor 126 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui kawasan rumah pangan lestari. Pemanfaatan lahan pekarangan melalui kawasan rumah merupakan prioritas dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Kawasan rumah pangan lestari adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk di manfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.

Tahun 2019 diterbitkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengembangan pangan lokal di Kabupaten Karanganyar. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal pemerintah daerah perlu menetapkan dan mengembangkan jenis pangan lokal.



Tabel 3.13
Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya Produktifitas Sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA Th. 2021	REALISASI KINERJA Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	3,13	3,53	5,5	3.66	66,55	5,5	66,55
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					66,55		66,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2.1.2 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Capaian kinerja sasaran 2.1.2

Capaian kinerja rata-rata sasaran 2.1.2 Tahun 2023 adalah sebesar 66.55% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sedang”

b. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB tahun 2023 sebesar 66.55% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sedang”.

c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi berupa hotel (baik klasifikasi bintang maupun non bintang, pondok wisata, homestay, dll), restoran, warung makan hingga kedai makan juga dicakup dalam kategori ini. Pada tahun 2017, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar sebesar 3,20 persen. Kontribusi tahun 2018 cenderung stabil bila dibandingkan tahun 2017. Pada



tahun 2019 memberikan kontribusi sebesar 3,26 persen. Pada Tahun 2020 sebesar 3,05 persen, dan pada Tahun 2021 sebesar 3,13 persen. Tahun 2022 sebesar 3,53 persen dan tahun 2023 sebesar 3,66 persen meningkat dibandingkan tahun sebelumnya namun belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar. Secara keseluruhan, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 7,39 persen pada tahun 2018. Laju pertumbuhan ini lebih cepat bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 5,31 persen. Peningkatan terjadi seiring dengan maraknya rumah makan dibangun di daerah wisata dan berdirinya beberapa hotel bintang di Kabupaten Karanganyar. Namun pada tahun 2020 kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2019, yaitu sebesar -6.93 persen karena adanya pandemi covid-19, dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 6,71 persen, tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat tinggi karena tidak ada lagi pembatasan aktivitas masyarakat, sehingga mampu tumbuh lagi sebesar 21,87 persen. Tahun 2023 juga mengalami pertumbuhan yang tinggi yaitu sebesar 12,17 persen, namun lebih lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya.

Tabel 3.14
Sasaran 2.1.3 : Meningkatkan Produktifitas Sektor Perdagangan

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA Th. 2021	REALISASI KINERJA Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6,47	4,63	4,63	4.66	100,65	4,63	100,65
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					100,65		100,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2024



Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2.1.3 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Capaian kinerja sasaran 2.1.3.

Capaian kinerja rata-rata sasaran 2.1.3 Tahun 2023 adalah sebesar 100,65% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

b. Capaian kinerja IKU.

Angka capaian kinerja IKU Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan tahun 2023 sebesar 100,65% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran.

Pada tahun 2023 lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami pertumbuhan sebesar 4,66 persen, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 4.63 persen.

Selama 5 tahun terakhir, Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang perekonomian Kabupaten Karanganyar sebesar kurang lebih 11 persen. Namun apabila dicermati setiap tahun mengalami penurunan walaupun tidak terlalu besar. Tahun 2021 kontribusi lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,25 persen, tahun 2022 turun menjadi 11,23 persen dan tahun 2023 turun lagi menjadi 11,12 persen.

Tabel 3.15

Sasaran 2.1.4 : Meningkatkan Produktifitas Sektor Industri Pengolahan

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA Th. 2021	REALISASI KINERJA Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	3,37	4,15	4,11	5,83	141,85	4,11	141,85
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					141,85		141,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2.1.4 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :



a. Capaian kinerja sasaran 2.1.4.

Capaian kinerja rata-rata sasaran 2.1.4 Tahun 2023 adalah sebesar 141,85% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

b. Capaian kinerja IKU.

Angka capaian kinerja IKU Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan tahun 2023 sebesar 141,85% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran.

Kategori Industri Pengolahan ini mencakup 16 sub kategori industri pengolahan, yaitu sub kategori Industri Batubara dan Pengilangan Migas, Industri Makanan dan Minuman, Industri pengolahan Tembakau, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit, Barang Dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Kertas dan Barang Dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, Industri Barang Galian bukan Logam, Industri Logam Dasar, Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik, Industri Mesin dan Perlengkapan, Industri Alat Angkutan, Industri Furnitur, dan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan. Kategori Industri Pengolahan dalam PDRB Kabupaten Karanganyar setiap tahunnya selalu memberikan kontribusi terbesar. Besaran kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB dalam lima tahun terakhir mencapai 46 persen.

Sedangkan pertumbuhan lapangan usaha industry pengolahan pada tahun 2020 minus sebesar -1,17 persen dikarenakan adanya dampak pandemi covid-19, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,37 persen. Tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 4,15 persen sedangkan tahun 2023 tumbuh lebih besar lagi menjadi 5,83 persen mengingat ada pabrik yang baru didirikan dengan tenaga kerja yang banyak. Penyumbang terbesar dari kategori industri pengolahan adalah industri kimia, farmasi dan obat tradisional dan industri tekstil dan pakaian jadi.



Tabel 3.16
Sasaran 2.1.5 : Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA Th. 2021	REALISASI KINERJA Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA Th. 2022	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/Investor	6,08	27,17	27,17	27,16	99,96%	27,17	99,96%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					99,96%		99,96%

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karanganyar Tahun 2023*

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2.1.5 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Capaian kinerja sasaran 2.1.5

Capaian kinerja rata-rata sasaran 2.1.5 Tahun 2023 adalah sebesar 99,96% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

b. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/Investor tahun 2023 sebesar 99,96% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Pada Tahun 2023, target persentase pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Karanganyar sebesar 27,17% terealisasi sebesar 27,16%. Realisasi nilai investasi pada tahun 2023 ini tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan oleh SDM pelaku usaha tidak merata dalam melaporkan LKPM online karena sebagian pelaku usaha kurang memahami laporan LKPM.



Tabel 3.17

**DATA PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023**

A. Rekapitulasi dari NIB OSS

NO	BULAN	REKAP NIB OSS UMK DAN NON UMK						JUMLAH
				2023				
		unit	Naker	IUMK	unit	naker	NON IUMK/ MENENGAH BESAR	JUMLAH
1	Januari	795	2.268	69.087.485.095	40	4.268	175.155.750.000	244.243.235.095
2	Pebruari	753	1.979	52.111.245.000	19	2.715	169.523.752.505	221.634.997.505
3	Maret	1.183	2.834	56.053.082.860	25	1.041	117.396.246.310	173.449.329.170
4	April	604	1.629	45.740.200.000	15	659	142.060.816.510	187.801.016.510
5	Mei	1.483	3.182	72.585.457.260	21	393	263.726.802.020	336.312.259.280
6	Juni	2.763	5.457	107.302.081.397	25	1.583	148.167.190.770	255.469.272.167
7	Juli	4.146	5.793	196.047.022.575	477	2.215	201.120.255.000	397.167.277.575
8	Agustus	2.290	4.122	98.613.365.492	18	1.551	131.925.182.988	230.538.548.480
9	September	1.646	2.103	72.392.217.654	14	1.233	86.515.598.907	158.907.816.561
10	Oktober	2.034	4.234	87.688.140.300	58	4.990	514.294.995.500	601.983.135.800
11	Nopember	1.452	3.531	134.429.801.593	35	4.415	640.072.964.590	774.502.766.183
12	Desember	1.135	2.971	125.363.071.057	22	341	169.243.531.300	294.606.602.357
	JUMLAH =	20.284	40.103	1.117.413.170.283	769	25.404	2.759.203.086.400	3.876.616.256.683

B. Rekapitulasi Perusahaan PMA/PMDN (LKPM)

No	URAIAN	INVESTASI / LKPM				KET.
		2023				
	PMDN	1.265		1.233.014.100.000		
	TRIB I	321		181.780.100.000		
	TRIB II	278		292.068.100.000		
	TRIB III	360		281.360.200.000		
	TRIB IV	306		477.805.700.000		



	PMA	108	92.369.643.317			
	TRIB I	29	66.077.466.711			
	TRIB II	28	13.657.426.909			
	TRIB III	33	7.114.352.318			
	TRIB IV	18	5.520.397.379			
	JUMLAH LKPM =	1.373	1.325.383.743.317			

Jumlah Potensi Investasi IUMK	20.284	1.117.413.170.283
Jumlah Potensi Investasi Non IUMK	769	2.759.203.086.400
Jumlah Investasi LKPM PMDN	1.265	1.233.014.100.000
Jumlah Investasi LKPM PMA	108	92.369.643.317
JUMLAH TAHUN 2023		5.202.000.000.000
REALISASI INVESTASI TAHUN 2022		4.091.980.602.140

Pertumbuhan Nilai Investasi dihitung dengan menggunakan rumus, sebagai berikut :

Tahun n - (n-1 /th sebelumnya)

$$\frac{\text{Tahun n} - (\text{n-1 /th sebelumnya})}{\text{Tahun n - 1}} \times 100\%$$

$$\frac{5.202.000.000.000 - 4.091.980.602.140}{4.091.980.602.140} \times 100\% = \frac{1.110.019.397.860}{4.091.980.602.140} = 27,12670234$$

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar berupaya untuk membenahi tata ruang dan regulasi pendukung perizinan di daerah strategis serta mendorong penyediaan infrastruktur daerah di lokasi strategis itu agar menarik minat investasi. Selanjutnya pada aspek pelayanan perizinan, pemerintah terus melakukan upaya penyederhanaan dan kemudahan perizinan berusaha serta meningkatkan kualitas pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat dan pertumbuhan investasi di daerah.



Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga telah membangun aplikasi SIMPEL guna optimalisasi pelayanan perizinan yang dapat diakses di alamat <https://simpel.karanganyarkab.go.id>. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat dapat secara mandiri atau pendampingan oleh petugas mengakses informasi jenis-jenis perizinan yang dilayani, tata cara pengurusan, pemantauan berkas pengajuan perizinan sampai dengan terbitnya dokumen perizinan, sehingga lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan adanya kepastian waktu penyelesaian perizinan.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Tahun 2020 diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi/investor di Kabupaten Karanganyar sehingga target dapat terpenuhi berdasarkan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

Tabel 3.18
Sasaran 2.1.6 : Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA Th. 2021	REALISASI KINERJA Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,15	70,70	74,99	70,69	94.27%	74,99	94.27%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					94.27%		94.27%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2024



Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2.1.6 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Capaian kinerja sasaran 2.1.6

Capaian kinerja rata-rata sasaran 2.1.6 Tahun 2023 adalah sebesar 94.27% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”

b. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2023 sebesar 94.27% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Tingkat partisipasi Angkatan kerja merupakan perbandingan antara jumlah Angkatan kerja dengan jumlah total Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja sehingga diperoleh nilai TPAK sebesar 70,69 (94.27%) pada tahun 2023 dari target yang ditentukan pada tahun 2023 sebesar 74,99. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 70,70, maka capaian tahun 2023 mengalami penurunan.

Sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah terciptanya lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang memasuki pasar kerja. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari kerja) yang biasanya disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), kesempatan kerja memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja.

Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Faktor-faktor lain yang mendasari tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara sosial maupun demografi serta ekonomi. Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) Umur; (2) Status perkawinan; (3) Tingkat pendidikan; (4) Daerah tempat tinggal; (5) Pendapatan; (6) Agama. Pengaruh dari masing-masing faktor tersebut terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja berbeda antara penduduk satu dengan penduduk yang lain. Wanita dalam keputusannya untuk berpartisipasi dalam pasar



tenaga kerja selain dipengaruhi oleh status perkawinan juga dipengaruhi oleh faktor pendapatan, tinggi rendahnya pendapatan suami, jumlah tanggungan keluarga, umur dan pendidikan wanita itu sendiri. Wanita jaman sekarang sudah mulai berpikir jauh kedepan mereka kini berusaha mandiri demi untuk mendapatkan penghasilan sendiri sehingga tidak terlalu tergantung pada pasangan mereka.

Tabel 3.19

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karanganyar, 2023

Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja Economically Active	304.094	227.109	531.203
Bekerja/Working	290.794	217.292	508.086
Pengangguran Terbuka Unemployment	13.300	9.817	23.117
Bukan Angkatan Kerja Economically Inactive	68.129	152.133	220.262
Sekolah/Attending School	24.280	30.710	54.990
Mengurus Rumah Tangga Housekeeping	19.183	109.897	129.080
Lainnya/Others	24.666	11.526	36.192
Jumlah/Total	372.223	379.242	751.465
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95,63	95,68	95,65
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	81,70	59,88	70,69
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,37	4,32	4,35

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2024

4. Efisiensi penggunaan Anggaran :

Efisiensi penggunaan Anggaran dalam pencapaian tujuan 2.1. antara lain dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target. Berikut ini adalah tabel efisiensi penggunaan anggaran pencapaian tujuan 2.1.



Tabel 3.20
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pencapaian Tujuan 2.1.

Misi 2: Pemberdayaan Perekonomian rakyat						
Meningkatnya produktifitas ekonomi dan daya saing daerah	Meningkatnya produktifitas sektor pertanian dan perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.208.917.500,00	3.208.917.500,00	100,00	0,00
		Program Penyuluhan Pertanian	441.250.000,00	441.155.000,00	99,98	0,02
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	10.793.800.700,00	10.704.083.847,00	99,17	0,83
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	808.075.000,00	804.263.500,00	99,53	0,47
	Jumlah		15.252.043.200,00	15.158.419.847,00	99,39	0,61
	meningkatkan produktifitas sektor perdagangan	Program Hubungan Industrial	221.961.100,00	214.923.998,00	96,83	3,17
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	409.404.000,00	406.116.000,00	99,20	0,80
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	42.736.000,00	40.475.904,00	94,71	5,29
		Program Pengembangan Umkm	3.630.000.000,00	3.589.890.000,00	98,90	1,10
	Jumlah		4.304.101.100,00	4.251.405.902,00	98,78	1,22
	Meningkatnya produktifitas sektor industri pengolahan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	55.000.000,00	53.500.000,00	97,27	2,73
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	30000000	29966800	99,89	0,11
	Jumlah		85.000.000,00	83.466.800,00	98,20	1,80
	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.714.394.500,00	3.714.394.500,00	100,00	0,00
		Program Penempatan Tenaga Kerja	160.093.200,00	155.857.200,00	97,35	2,65
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	646.183.600,00	631.369.125,00	97,71	2,29
	Jumlah		4.520.671.300,00	4.501.620.825,00	99,58	0,42
	meningkatkan nilai investasi daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	475.000.000,00	463.212.800,00	97,52	2,48
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	5.000.000,00	4.980.000,00	99,60	0,40
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		386.000.000,00	357.961.700,00	92,74	7,26	
Jumlah		871.000.000,00	831.154.500,00	95,43	4,57	

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan capaian kinerja

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian tujuan 2.1, sebagaimana tabel 3.21.

Tabel 3.21

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Meningkatnya produktifitas ekonomi dan daya saing daerah	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan	87,46	99,39	0,61
	Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	100,65	98,78	1,22



	Meningkatnya produktifitas sektor industri pengolahan	141,85	98,20	1,80
	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	94,27	99,58	0,42
	Meningkatnya nilai investasi daerah	99,96	95,43	4,57

Berdasarkan tabel 3.21 tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 telah melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian sasaran kinerja pada tujuan 2.1 sangat memuaskan yaitu rata-rata melebihi 100%, dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.



3. Misi 3 : Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

TUJUAN 3.1 :

Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.22
Tujuan 3.1 : Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA Th. 2021	REALISASI KINERJA Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Indek Pembangunan Manusia (IPM)	75,99	76,58	76,58	77,31	100,95	76,58	100,95
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					100,95		100,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 3.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan 3.1

Capaian kinerja rata-rata tujuan 3.1 tahun 2023 adalah sebesar 100,95% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi.”

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Indek Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2023 sebesar 100,95% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.



3. Analisis Pencapaian Kinerja Tujuan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Karanganyar tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Karanganyar tahun 2023 adalah 77,31 atau tumbuh 0,73 poin dibandingkan capaian tahun 2022.

Peningkatan IPM Kabupaten Karanganyar tahun 2023 terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Dari sisi Pendidikan, anak-anak di Kabupaten Karanganyar yang berusia 7 tahun pada tahun 2023, memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 13,71 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu menamatkan Pendidikan hingga setingkat Diploma I atau Diploma II. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 13,70 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,22 tahun dari 8,79 tahun menjadi 9,02 tahun pada tahun 2023.

Dalam pencapaian IKU Indek Pembangunan Manusia (IPM) didukung sasaran sebagai berikut

- Meningkatnya kualitas pendidikan
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Tabel 3.23
Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan

INDIKATOR SASARAN	REALISASI SASARAN Th. 2021	REALISASI SASARAN Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN SASARAN Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Harapan Lama Sekolah	13,69	13,7	13,98	13,71	98,07	13,98	98,07
Rata-rata Lama Sekolah	8,57	8,79	8,79	9,02	102,62	8,79	102,62
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					100,35		100,35

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2023



Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3.1.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran 3.1.1

Capaian kinerja rata-rata sasaran 3.1.1 tahun 2023 adalah sebesar 100,35% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”

2. Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Harapan Lama Sekolah tahun 2023 sebesar 98,07% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

b. Angka capaian kinerja IKU Rata-rata Lama Sekolah tahun 2023 sebesar 102,62% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

a. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja

Capaian realisasi indikator kinerja kunci Dinas pendidikan dan kebudayaan Tahun 2023 dapat dilihat pada table tersebut dibawah ini.

Tabel 3.24

**Capaian Realisasi Indikator Kunci Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2023**

NO	Indikator Utama	Realisasi 2022	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Harapan lama Sekolah	13,7	13,98	13,71	98,07%
2	Angka Rata-rata lama Sekolah	8,79	8,79	9,02	102,62%

Dari tabel diatas, maka capaian tahun 2023 naik jika dibanding tahun 2022. Capaian indikator kinerja utama tersebut didukung oleh indikator sasaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai berikut :



Tabel 3.25

Indikator sasaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	2023	
			target	realisasi
1	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka partisipasi sekolah	95,25	99,62
2		Angka putus sekolah SD/MI	0,03	0,004
3		Angka putus sekolah SMP/MTs	0,14	0,003
4		Angka melanjutkan	95,25	99,62
5		Persentase fasilitas pendidikan SD/MI dalam kondisi baik	83	86
6		Persentase fasilitas pendidikan SMP/MTs dalam kondisi baik	87	88,2

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2023

Tabel 3.26

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023		
				Target	realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan lama Sekolah	13,7	13,98	13,71	98,07%
		Angka Rata-rata lama Sekolah	8,79	8,79	9,02	102,62%

Pada tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Review Rencana Strategis dengan indikator-indikator baru untuk mendukung visi misi Pemerintah Daerah. Tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Program Pemerintah Daerah yang sinergi dengan Tujuan dan sasaran rencana strategis Perangkat Daerah diharapkan dapat menambah Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karanganyar semakin tinggi, yang mana pada tahun 2023 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir melaksanakan pemerintahan dengan Kepala Daerah yang baru.

Pada pencapaian indikator Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu pada indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2023 mencapai 13,71, meningkat 0,01% dibanding tahun 2022



sebesar 13,70%. Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2023 sebesar 9,02% naik 0,23% dibanding tahun 2022 sebesar 8,79%. Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2023 mencapai 99,62%. Sedangkan Angka Putus Sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2023 mencapai 0,004, sedangkan angka putus sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2023 sebesar 0,003. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2023 mencapai 99,62%, terjadi kenaikan dari tahun 2022 sebesar 4,37%. Sedangkan ruang kelas yang sesuai Standar Nasional Pendidikan pada jenjang SD/MI pada tahun 2023 mencapai 86%, mengalami peningkatan sebesar 3% dibanding pada tahun 2022 dengan nilai 83%, untuk ruang kelas pada jenjang SMP/MTs yang sesuai Standar Nasional Pendidikan pada tahun 2023 mencapai 88,2%, mengalami peningkatan sebesar 1,2% dibanding pada tahun 2022 yang mencapai 87%.

Tabel 3.27

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.

Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Data Capaian pada Tahun 2023
	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program		2019	2020	2021	2022	2023	
	(<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)		target	target	target	target	target	
2	5	6	7	9	11	13	15	17
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Angka Harapan lama Sekolah	13,7	13,0	13,1	13,2	13,3	13,4	13,71
	2. Angka Rata-rata lama Sekolah	8,79	8,0	8,15	8,17	8,20	8,25	9,02



d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2022	2023			Analisis Permasalahan
					Target	realisasi	Capaian	
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan lama Sekolah	13,7	13,98	13,71	98,07%	Tingkat capaian angka harapan lama sekolah tidak tercapai 100%, hal ini dikarenakan formula perhitungan tidak hanya pada jenjang sekolah dasar (SD, SMP) yang menjadi kewenangan Kabupaten, namun juga jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan provinsi dan juga Perguruan tinggi, yang menjadi kewenangan Dikti masuk dalam formulasi.
			Angka Rata-rata lama Sekolah	8,79	8,79	9,02	102,62%	



Tabel 3.28
Sasaran 3.1.2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA Th. 2021	REALISASI KINERJA Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Usia Harapan Hidup	77,55	77,64	77,84	77,72	99,85%	77,84	99,85%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					99,85%		99,85%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3.1.2 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran 3.1.2

Capaian kinerja rata-rata sasaran 3.1.2 tahun 2023 adalah sebesar 99,85% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”

2. Capaian kinerja IKU

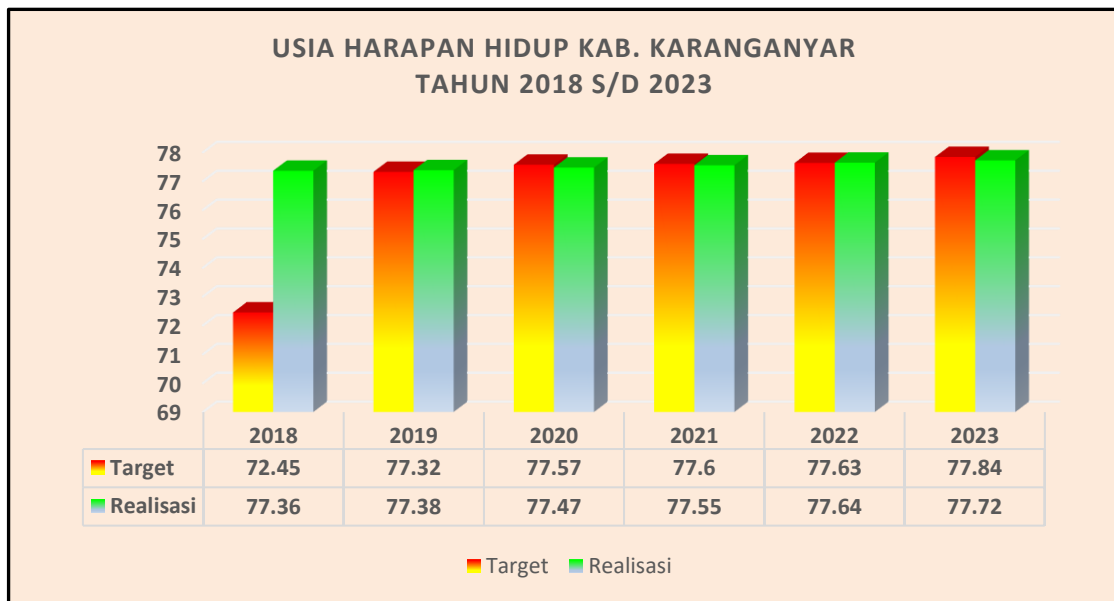
Angka capaian kinerja IKU Usia Harapan Hidup tahun 2023 sebesar 99,85% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Pembangunan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan yang murah dan baik. Keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang kesehatan ditandai dengan semakin meningkatkan usia harapan hidup.

Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator kemampuan dalam meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan sosial ekonomi, fasilitas kesehatan, kecukupan gizi, dan kesehatan lingkungan. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari Grafik 3.1

Grafik 3.1
Usia Harapan Hidup Di Kabupaten Karanganyar



Berdasarkan grafik diatas Usia Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 selalu mengalami peningkatan. Sehingga hal tersebut dapat menggambarkan keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya di Kabupaten Karanganyar. Walaupun pada tahun 2023 realisasi UHH belum memenuhi dari target yang ditetapkan yaitu 77,72 dari target 77,84 atau sebesar 99,85%. Sehingga kita perlu lebih bekerja keras lagi dalam meningkatkan progam-program kesehatan yang ada di masyarakat. Berbagai faktor penyebab dapat menjadi pemicu belum tercapainya target rata-rata UHH yaitu pelayanan kesehatan, masih belum teratasinya penyakit menular dan mulai berkembangnya dan meningkatnya penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskuler, dan diabetes mellitus, selain daripada itu juga terjadi perubahan gaya hidup yaitu kurang aktifitas fisik, obesitas sebagai dampak dari diet tidak sehat serta kebiasaan merokok yang ada di masyarakat.



Peningkatan Usia Harapan Hidup menjadi salah satu indikator meningkatnya indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang mencapai 77,31 pada Tahun 2023. Jika dibandingkan IPM pada tahun 2022 sebesar 76,58, maka terjadi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar.

4. Efisiensi penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan sumber anggaran dalam pencapaian tujuan 3.1. antara lain dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target. Berikut ini adalah tabel efisiensi penggunaan anggaran pencapaian tujuan 3.1.

Tabel 3.29
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pencapaian Tujuan 3.1

Misi 3 : Pendidikan gratis SD/SMP dan kesehatan gratis						
Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kualitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	199.967.994.624,00	195.460.603.907,00	97,75	2,25
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.000.000,00	38.210.000,00	90,98	9,02
	Jumlah		200.009.994.624,00	195.498.813.907,00	97,74	2,26
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	919.377.000,00	904.236.000,00	98,35	1,65
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	75.364.945.600,00	64.033.169.575,00	84,96	15,04
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.462.852.000,00	4.094.089.608,00	91,74	8,26
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	666.639.100,00	657.346.882,00	98,61	1,39
	Jumlah		81.413.813.700,00	69.688.842.065,00	85,60	14,40

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan capaian kinerja.

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian tujuan 3.1, sebagaimana tabel 3.30.



Tabel 3.30

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kualitas Pendidikan	100,35	97,74	2,26
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	99,85	85,60	14,40

Berdasarkan tabel 3.30 tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan 3.1, dengan capaian kinerja sasaran sangat memuaskan yaitu rata-rata melebihi 100%, dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.



4. Misi 4 : Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

TUJUAN 4.1 :

Terwujudnya Pemerataan Antar Desa

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.31
Tujuan 4.1 : *Terwujudnya Pemerataan Antar Desa*

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA Th. 2021	REALISASI KINERJA Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Indek Desa Membangun (IDM)	0,6937	0,7078	0,7078	0,7162	101,19%	0,7078	101,19%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					101,19%		101,19%

Sumber: Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 4.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan 4.1

Capaian kinerja rata-rata tujuan 4.1 tahun 2023 adalah sebesar 101,19% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Indek Desa Membangun (IDM) Kabupaten Karanganyar tahun 2023 (Capaian kinerja IKU akhir RPJMD) adalah sebesar 101,19% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

3. Analisis Pencapaian IKU

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi atau lingkungan.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam indeks desa membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Metode Penghitungan

1. Sumber Data

Pengambilan sampel dilakukan dengan pengambilan data pada seluruh desa dengan harapan mendapatkan gabungan secara keseluruhan terhadap status desa dan perkembangan desa.

2. Teknik Penghitungan

- a. Setiap indikator memiliki skor. Nilai skor yaitu 0 – 5.
- b. Penetapan skor berdasarkan hasil FGD *Analitycal Hierarcchy Process* (AHP)
- c. Perhitungan indeks pada setiap dimensi dilakukan dengan metode skoring yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah indeks

Rumus :

$$I_x = \frac{\sum_1^n Skor X}{n_x * 5}$$

- Misalkan : Indeks Ketahanan Lingkungan terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator kualitas lingkungan, indikator rawan bencana, dan indikator tanggap bencana. Desa Sukamaju memiliki skor kualitas lingkungan 4, skor rawan bencana 5, dan skor tanggap bencana 3. Maka, nilai indeks ketahanan lingkungannya berikut :

$$Indeks_{Lingkungan} = \frac{4 + 5 + 3}{3 * 5} = \frac{12}{15} = 0,8$$



- Penghitungan Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus :

$$IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$$

- Ket : IDM (Indeks Desa Membangun)
IKS (Indeks Ketahanan Sosial)
IKE (Indeks Ketahanan Ekonomi)
IKL (Indeks Ketahanan Lingkungan)

Secara total nilai IDM pada Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan dari nilai indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan, tetapi mengalami penurunan dari nilai indeks ketahanan sosial. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar mencatat pada tahun 2022 realisasi IDM sebesar 0,6929 dan menargetkan pada tahun 2023 sebesar 0,7078, terealisasi sebesar 0,7162. Tercapainya target IKE karena meningkatnya jumlah industri mikro dan kecil, meningkatnya lembaga ekonomi rakyat (Koperasi/Bumdes), meningkatnya akses jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat atau lebih. IKL karena Resiko bencana berkurang, kualitas lingkungan hidup di Karanganyar terjaga kualitasnya. Sedangkan penyebab tidak tercapainya target IKS karena Kurangnya tenaga dokter dan tenaga kesehatan, Jumlah kepesertaan BPJS masih rendah, Kurangnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Paket ABC, dan pusat keterampilan atau kursus di tiap desa.

Dalam pencapaian IKU Indek Desa Membangun (IDM) didukung sasaran sebagai berikut.



Tabel 3.32
Sasaran 4.1.1 : Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa

INDIKATOR SASARAN	REALISASI SASARAN Th. 2021	REALISASI SASARAN Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN SASARAN Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Indeks Ketahanan Sosial	0,8056	0,8227	0,8227	0,8214	99,84%	0,8227	99,84%
Indek Ketahanan Ekonomi	0.6388	0,6648	0,6648	0,6745	101,46%	0,6648	101,46%
Indeks Ketahanan Lingkungan	0,6366	0,6358	0,6358	0,7162	112,65%	0,6358	112,65%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					104,65%		104,65%

Sumber : Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

1. Capaian kinerja sasaran 4.1.1

Capaian kinerja rata-rata sasaran 4.1.1 tahun 2023 adalah sebesar 104,65% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

2. Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Indeks Ketahanan Sosial tahun 2023 sebesar 99,84% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

b. Angka capaian kinerja IKU Indek Ketahanan Ekonomi tahun 2023 sebesar 101,46% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

c. Angka capaian kinerja IKU Indeks Ketahanan Lingkungan tahun 2023 sebesar 112,65% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

a. Indeks Ketahanan Sosial

Pada tahun 2022 capaian sasaran Kabupaten Karanganyar pada indikator sasaran indeks ketahanan sosial sebesar 0,8227 dari target 0,7909 dan pada tahun 2023 dengan target sebesar 0,8227 terealisasi sebesar 0,8214, sehingga capaian sasaran Tahun 2023



terhadap target akhir RPJMD sebesar 99,84%.

b. Indeks Ketahanan Ekonomi

Pada tahun 2022 capaian sasaran kabupaten karanganyar pada indikator sasaran indeks ketahanan ekonomi sebesar 0,6648 dari target 0,6329, dan pada tahun 2023 dengan target sebesar 0,6648 terealisasi sebesar 0,7162 sehingga capaian sasaran Tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD sebesar 101,46%.

c. Indeks Ketahanan Lingkungan

Pada tahun 2022 capaian sasaran kabupaten karanganyar pada indikator sasaran indeks ketahanan lingkungan sebesar 0,6358 dari target 0,6317, dan pada tahun 2023 dengan target sebesar 0,6358 terealisasi sebesar 0,6358 sehingga capaian sasaran Tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD sebesar 104,65%.

4. Efisiensi penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan sumber anggaran dalam pencapaian tujuan 4.1. antara lain dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target. Berikut ini adalah tabel efisiensi penggunaan anggaran pencapaian tujuan 4.1.

Tabel 3.33
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pencapaian Tujuan 4.1.

Misi 4 : Pembangunan Desa sebagai Pusat pertumbuhan						
Terwujudnya pemerataan antar desa	meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	7.217.568.900,00	6.942.383.147,00	96,19	3,81
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	9.265.473.300,00	9.224.535.690,00	99,56	0,44
		Program Penataan Desa	203.300.800,00	201.764.300,00	99,24	0,76
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	160.000.000,00	159.657.600,00	99,79	0,21
jumlah			16.846.343.000,00	16.528.340.737,00	98,11	1,89

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan capaian kinerja

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian tujuan 4.1, sebagaimana tabel 3.34.



Tabel 3.34

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Terwujudnya pemerataan antar desa	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	104,65	98,11	1,89

Berdasarkan tabel 3.31 tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan 4.1 dengan capaian kinerja sasaran sangat memuaskan yaitu rata-rata melebihi 100%, dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.



5. Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

TUJUAN 5.1 :

Terwujudnya Masyarakat yang Relegius, Berbudaya, Berprestasi, dan Kesetaraan Gender

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.35

Tujuan 5.1 : *Terwujudnya Masyarakat yang Relegius, Berbudaya, Berprestasi, dan Kesetaraan Gender*

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA Th. 2021	REALISASI KINERJA Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Nilai Kabupaten Peduli HAM	Na	78,25	80,50	80	96,60	80,50	96,60
Indeks Pembangunan Kebudayaan	89,39	94,49	94,49	94,50	100,01	94,49	100,01
Prestasi Pemuda dan Olah Raga	24	56	56	77	137,50	56	137,50
Angka Kemiskinan	10,68	9,85	8,96	9,79	90,74	8,96	90,74
IPG (Indeks Pembangunan Gender)	96,48	86,93	97,35	97,03	99,67	97,35	99,67
Indeks Reformasi Birokrasi	59	62,01	80	70,91	88,64	80	88,64
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					102,19		102,19

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaa Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 dan Badan Pusat Statistik 2024



Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 5.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan 5.1

Capaian kinerja rata-rata tujuan 5.1 tahun 2023 adalah sebesar 102,19% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”

2. Capaian kinerja IKU

- a. Angka capaian kinerja IKU Nilai Kabupaten Peduli HAM Tahun 2023 sebesar 96,60% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
- b. Angka capaian kinerja IKU Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023 sebesar 100,01% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
- c. Angka capaian kinerja IKU Prestasi Pemuda dan Olah Raga Tahun 2023 sebesar 137,50% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
- d. Angka capaian kinerja IKU Angka Kemiskinan Tahun 2023 sebesar 90,74% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
- e. Angka capaian kinerja IKU IPG (Indeks Pembangunan Gender) Tahun 2023 sebesar 99,67% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”.
- f. Angka capaian kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sebesar 88,64% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”.

3. Analisis Pencapaian IKU

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, hal tersebut berdampak pada indikator pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM yang sebelumnya hanya terdiri atas 6 (enam) hak dengan 81 (delapan puluh satu), sejak tahun 2022 berubah menjadi 10 (sepuluh) hak dengan 115 (seratus lima belas) indikator yang terdiri dari :

a. Hak Sipil dan Politik

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Hak Bantuan Hukum | : | 6 indikator |
| 2. Hak Atas Informasi | : | 4 indikator |
| 3. Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan | : | 5 indikator |
| 4. Hak Atas Keberagaman dan Pluralisme | : | 10 indikator |
| 5. Hak Atas Kependudukan | : | 6 indikator |

b. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

- | | | |
|-----------------------|---|--------------|
| 6. Hak Atas Kesehatan | : | 30 indikator |
|-----------------------|---|--------------|



- 7. Hak Atas Pendidikan : 20 indikator
- 8. Hak Atas Pekerjaan : 11 indikator
- 9. Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat : 10 indikator
serta Hak Atas Perumahan yang Layak
- 10. Hak Perempuan dan Anak : 13 indikator
- Jumlah : 115 Indikator

Dimana dalam satu indikator dapat meliputi beberapa indikator data yang harus disajikan.

Realisasi Kabupaten/Kota Peduli HAM, pada tahun 2023 untuk Kabupaten Karanganyar adalah sebesar 80 dari target yang ditetapkan sebesar 80,5. Capaian tahun 2023 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 78,25, Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 sudah memasuki tahun kedua sejak pemberlakuan Permenkumham 22 Tahun 2021 sehingga pemahaman terhadap materi semakin lebih baik.

Dalam pencapaian Tujuan 5.1 didukung sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.36

Sasaran 5.1.1 : Meningkatkan Kualitas Keagamaan Dalam Keberagaman

INDIKATOR SASARAN	REALISASI SASARAN Th. 2021	REALISASI SASARAN Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN SASARAN Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Penurunan Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban, dan Kenyamanan	93	120	120	130	91,60	120	91,60
Persentase Tertanganinya Kasus Pelanggaran Perda	88	88,4	92	95,2	105,7	92	105,7
Persentase Pengendalian Kasus Konflik SARA (tidak ada kasus)	0	0	0	0	100	0	100
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					99,1		99,1

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2023



Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 5.1.1 sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran 5.1.1

Capaian kinerja rata-rata sasaran 5.1.1 tahun 2023 adalah sebesar 99,1% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

2. Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Penurunan Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan tahun 2023 sebesar 91,60% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

b. Angka capaian kinerja IKU Presentase Tertanganinya Kasus Pelanggaran Perda tahun 2023 sebesar 105,7% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

c. Angka capaian kinerja IKU Jumlah Konflik Keagamaan/SARA tahun 2023 sebesar 100% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

d. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Pencapaian rata-rata kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Keagamaan dalam Keberagaman” tahun 2023 sebesar 99,1% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman, Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersama dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Karanganyar membentuk Forum Generasi Muda Lintas Agama (FORGIMALA), yang mana hal tersebut sebagai bagian dalam membangun kerukunan beragama sejak dini.

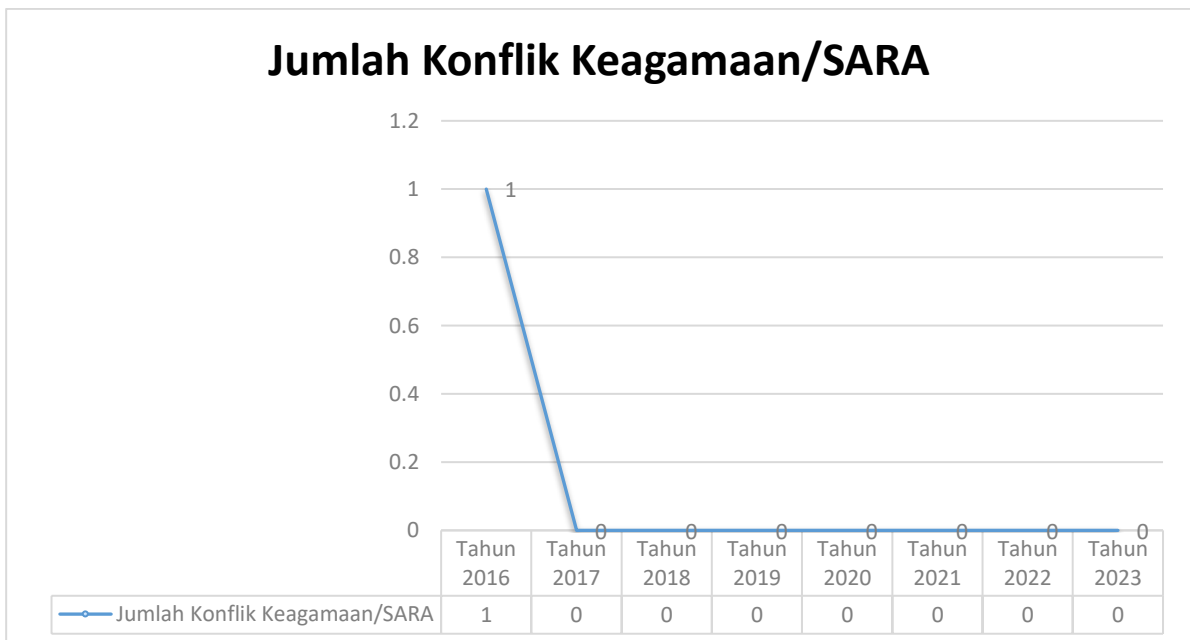
Capaian indikator sasaran penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan tahun 2023 menunjukkan bertambahnya kasus yaitu sebesar 130 kasus dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 120 kasus, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terkait tentang Perbup Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penggunaan Sanksi Administratif sehingga menyebabkan kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah.



Untuk capaian indikator presentase tertanganinya kasus pelanggaran Perda, pada tahun 2023 sebesar 95,2%, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 92%, hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah telah memahami tugas dan fungsi sesuai Perbup Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penggunaan Sanksi Administratif.

Secara umum kondisi kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Karanganyar sepanjang tahun 2023 cukup kondusif. Konflik internal dan eksternal terkait Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) hampir tidak ada. Masyarakat hidup berdampingan secara baik. Bibit-bibit permasalahan konflik keagamaan/SARA dapat diantisipasi dengan baik oleh Pemerintah dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dengan difasilitasi Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Karanganyar. Hal ini sejalan dengan nilai index kerukunan umat beragama di Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 77,85 atau kategori “Baik” dan Nasional sebesar 76,02.

Grafik 3.2
Jumlah Konflik Keagamaan/SARA di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2016-2023



Sumber: *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2023*



4. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Dalam pencapaian IKU Indeks Pembangunan Kebudayaan didukung sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.37
Sasaran 5.1.2 : Meningkatkan Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan

INDIKATOR SASARAN	REALISASI SASARAN Th. 2021	REALISASI SASARAN Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN SASARAN Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	93	100	107,53	93	107,53
Persentase Kelompok Seni Budaya yang aktif	88,98	88,98	85	88,99	104,69	85	104,69
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					106,11		106,11

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 5.2.1 sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran 5.1.2

Capaian kinerja rata-rata sasaran 5.1.2 tahun 2023 adalah sebesar 106,11% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja "Sangat Tinggi".

2. Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif tahun 2023 adalah sebesar 107,53% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja "Sangat Tinggi".

a. Angka capaian kinerja IKU Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan tahun 2023 adalah sebesar 104,69% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja "Sangat Tinggi".

3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran



a. Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Dalam sasaran Memajukan dan Melestarikan Adat dan Budaya Daerah, terdapat indikator Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Upaya pelestarian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Tujuan utamanya adalah memperpanjang usia benda cagar budaya, situs atau kawasan peninggalan bersejarah dengan cara perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan atau pengembangan untuk menjaga keberlanjutan, keserasian dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan yang berkualitas. Pada tahun 2023, Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya dapat sepenuhnya dilestarikan. Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yg dilestarikan pada tahun 2023 mencapai 107,53%.

b. Persentase kelompok seni budaya yang aktif

Seni dan budaya merupakan elemen penting yang sangat diperlukan dalam kehidupan, karenanya perlu dilindungi dan dilestarikan, khususnya budaya jawa yang terancam hilang atau luntur. Melalui seni diharapkan mampu meningkatkan dinamika kehidupan, sedangkan melalui budaya diharapkan mampu memperkuat jati diri sehingga mampu menangkal pengaruh dari luar yang bersifat negatif.

Mengenai presentase kelompok seni dan budaya yang aktif pada tahun 2023 mencapai 88,99%, meningkat 0,01% dibandingkan dengan tahun 2022 dengan nilai 88,98%.

Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif dan dilestarikan berdasarkan pada data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan peningkatan yang signifikan selama lima tahun berturut-turut, yaitu pada 2018 sejumlah 756 kelompok, tahun 2019 sejumlah 779 kelompok, tahun 2020 sejumlah 793 kelompok, tahun 2021 sejumlah 798, tahun 2022 sejumlah 799 dan pada tahun 2023 sejumlah 812.

Peningkatan jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif dan dilestarikan yang signifikan ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mengembangkan dan melakukan pembinaan kebudayaan agar nilai dan karakteristik budaya khususnya budaya lokal tidak semakin memudar. Selain itu, Pemerintah juga

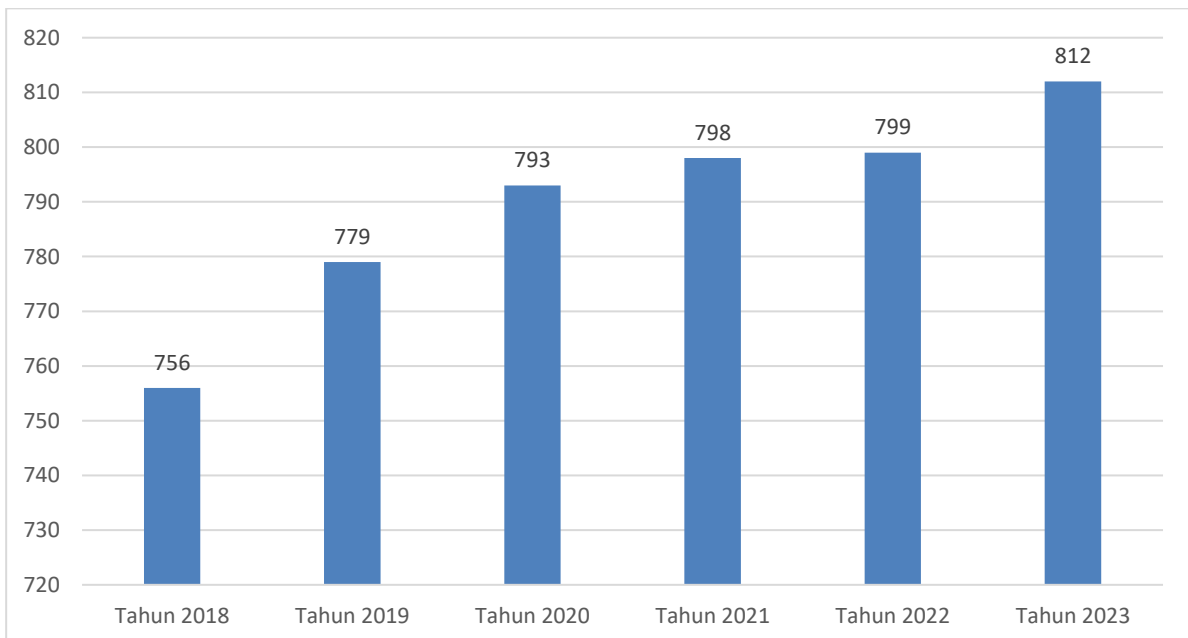


memberikan stimulan berupa bantuan dana kepada sejumlah kelompok seni dan budaya untuk memicu kreativitas seni. Pemerintah juga banyak berkontribusi pada promosi *event* budaya dengan menggandeng para seniman untuk menyuguhkan kreasinya di perhelatan formal dimana event ini mulai dirintis dari ide kreatif serta memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki. Selain itu, proses regenerasi kesenian tradisional di kalangan warga harus secara kontinyu dilestarikan, mengingat bahwa perwujudan kesenian dan kebudayaan tradisional merupakan wahana dalam pengembangan pariwisata.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah membangun Gedung Teater sebagai sarana pelestarian dan pengembangan seni teater yang ada di Kabupaten Karanganyar dan dapat menjadi tempat berproses dan berkarya dan sekaligus sebagai ajang kreativitas dan pertunjukan kesenian khususnya seni teater bagi warga masyarakat Kabupaten Karanganyar.

Pembangunan Gedung teater merupakan salah satu program unggulan dalam pencapaian misi 5 Bupati Karanganyar.

Grafik 3.3
Jumlah Kelompok Seni dan Budaya Tahun 2018-2023



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023



4. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Dalam pencapaian IKU Prestasi Pemuda dan Olah Raga didukung sasaran sebagai berikut

Tabel 3.38
Sasaran 5.1.3 : Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga

INDIKATOR SASARAN	REALISASI SASARAN Th. 2021	REALISASI SASARAN Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN SASARAN Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Jumlah Prestasi Pemuda di Regional/Nasional/Internasional	4	2	8	2	25	8	25
Jumlah Prestasi Olah Raga di Regional/Nasional/Internasional	20	54	54	76	140,74	54	140,74
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					82,87		82,87

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 5.1.3 sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Capaian kinerja sasaran 5.1.3

Capaian kinerja rata-rata sasaran 5.1.3 tahun 2023 adalah sebesar 82,87% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi.”.

b. Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Jumlah Prestasi Pemuda di Regional/Nasional/Internasional tahun 2023 adalah sebesar 25% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Rendah”.

b. Angka capaian kinerja IKU Jumlah Prestasi Olah Raga di Regional/Nasional/Internasional tahun 2023 adalah sebesar 140,74% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

1). Jumlah prestasi pemuda di regional/nasional/internasional



Pada Tahun 2023, prestasi pemuda Kab. Karanganyar berjumlah 2 buah dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Juara	Perlombaan	Tingkat
1	Perdana Mangayu Bagyo	I	World Young Investors Exhibition Kategori Agriculture	Internasional
2	Adelisa Devita	I	Putri Otonomi Indonesia Duta Keluarga Berencana	Nasional

Capaian belum mencapai target dikarenakan:

1. Minimnya event kejuaraan kepemudaan yang dilaksanakan berjenjang dari tingkat regional maupun nasional tahun 2023.
2. Minimnya pemuda yang mengikuti kegiatan kejuaraan pemuda berprestasi ditingkat regional/ nasional/ internasional. Pada tahun 2023 hanya mengirimkan 1 event jambore pemuda tingkat provinsi dan pemuda pelopor.
3. Kurangnya motivasi tambahan bagi pemuda berprestasi dalam bentuk reward.
4. Dalam pengembangan kepemudaan tidak hanya fokus pada prestasi pemuda, namun juga dalam pembinaan pemuda dalam kepemimpinan, kewirausahaan dan organisasi.
5. Pemerintah Kab. Karanganyar berkomitmen untuk selalu mendorong dan memfasilitasi pemuda-pemudi agar selalu mengembangkan bakat dan kemampuannya serta kreatifitas untuk memberikan dampak kepada sekitar dan mencapai prestasi lebih tinggi. Selain itu juga bekerjasama dengan lembaga terkait dengan pembinaan dan pengembangan pemuda prestasi yang berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan untuk menjadi pelopor perubahan di Kab. Karanganyar dan diikuti berbagai event/perlombaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

2). Jumlah Prestasi Olahraga di regional/nasional/internasional

Pada tahun 2023, prestasi olahraga Kab. Karanganyar melebihi target dengan capaian sejumlah 76 medali dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.39
Jumlah Prestasi Pemuda di Regional/Nasional/Internasional

NO	TINGKAT	KEJUARAAN	JUMLAH PRESTASI
1	NASIONAL	MULTI EVENT	33
2	PROVINSI	POPDA PROVINSI	3
		PORPROV	8
		PEPARPROV	16
		PEPARPEDA	3
3	KARESIDENAN	POPDA KARESIDENAN	13
		TOTAL	76

Capaian melebihi target dikarenakan:

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dalam peningkatan prestasi olahraga.
2. Adanya kerjasama antara lembaga terkait dengan pembinaan atlet berprestasi yang berkolaborasi dengan Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga.
3. Adanya pembinaan olahraga prestasi melalui pembinaan atlet prestasi daerah yang bekerjasama dengan organisasi keolahragaan daerah dan diikuti berbagai event/perlombaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Hal ini sebagai sarana untuk mempersiapkan generasi yang memiliki berjiwa kompetisi untuk meningkatkan kemampuan tinggi dan memupuk rasa cinta olahraga. Selain itu juga sebagai upaya dalam menjaga kesinambungan pembibitan dan pembinaan atlet yang nantinya dapat menyumbangkan prestasi terbaik baik dikawasan regional, nasional, maupun internasional.
4. Pengembangan atlet berprestasi sangat didukung oleh pemerintah daerah dan telah dibuktikan dengan berbagai sarana prasarana olahraga yang dipelihara dan direnovasi.
5. Adanya reward dan penghargaan dari Pemerintah Daerah untuk atlet berprestasi yang dapat memicu semangat untuk mencapai prestasi lebih tertinggi.



6. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Dalam pencapaian IKU Angka Kemiskinan didukung sasaran sebagai berikut

Tabel 3.40
Sasaran 5.1.4 : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

INDIKATOR SASARAN	REALISASI SASARAN Th. 2021	REALISASI SASARAN Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN SASARAN Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Pengeluaran Perkapita	11,51	11,79	15,45	14,34	92,82%	15,45	92,82%
Persentase Penanganan PMKS	29,32	69,34	69,34	76,59	110,45%	2,5	110,45%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					101,64%		101,64%

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2023 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 5.1.4 sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja sasaran 5.1.4
Capaian kinerja rata-rata sasaran 5.1.4 tahun 2023 adalah sebesar 101,64% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
- b. Angka capaian kinerja rata-rata sasaran 5.1.4 terhadap target akhir RPJMD adalah sebesar 101,64% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
- c. Capaian kinerja IKU
 - a. Angka capaian kinerja IKU Pengeluaran Perkapita tahun 2023 adalah sebesar 92,82.% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
 - b. Angka capaian kinerja IKU Persentase Penanganan PMKS tahun 2023 adalah sebesar 110,45% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
- d. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Capaian kinerja sasaran presentase penanganan PMKS untuk tahun 2023 sebesar 110,45 atau kategori sangat baik. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sejumlah 147.909. Jumlah PMKS yang ditangani Tahun 2023 sebanyak 113.287 atau 76,59%. Capaian penanganan PMKS pada tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan karena banyaknya program-program



dari Kementerian Sosial yang disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten sehingga capaian realisasi penanganan PMKS sangat tinggi.

7. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Dalam pencapaian IKU IPG (Indeks Pembangunan Gender) didukung sasaran sebagai berikut

Tabel 3.41
Sasaran 5.1.5 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Gender, dan Perlindungan Anak

INDIKATOR SASARAN	REALISASI SASARAN Th. 2021	REALISASI SASARAN Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN SASARAN Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,29	73,38	74,95	73,69	98,32	74,95	98,32
Kabupaten Layak Anak	758	642,35	780	622,43	79,80	780	79,80
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					89,06		89,06

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 5.1.5 sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Capaian kinerja sasaran 5.1.5

Capaian kinerja rata-rata sasaran 5.1.5 tahun 2023 adalah sebesar 89,06% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

b. Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 adalah sebesar 98,32% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

b. Angka capaian kinerja IKU Kabupaten Layak Anak tahun 2023 adalah sebesar 79,80% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”.



c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan dari Perspektif gender digunakan beberapa indikator diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan adapun IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.

Komitmen dan Peran Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui strategi penerapan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada seluruh bidang pembangunan di Daerah. Untuk mendukung pelaksanaannya telah diterbitkan Instruksi Bupati Nomor 476/42 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Perangkat Daerah.

Capaian sasaran tahun 2023 sebesar 99,67% dengan capaian sasaran terhadap target akhir RPJMD sebesar 99,67%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan perempuan dalam dunia politik dan ekonomi yang tinggi yang mengalami kenaikan dari capaian kinerja tahun 2022 walaupun belum memenuhi target tahun 2023 karena keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi mengalami penurunan.

b. Kabupaten Layak Anak

Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan diskriminasi. Indonesia telah mengesahkan konvensi tentang hak anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak secara efektif. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan



hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak. Klaster hak anak terdiri dari 5 (lima) klaster, yaitu:

1. hak sipil dan kebebasan;
2. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
5. perlindungan khusus.

Penginputan evaluasi mandiri Kabupaten Layak anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Gambar 2 Sumber Data Kabupaten Layak Anak dari KemenPPPA Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dan dilakukan verifikasi administrasi dan penilaian oleh Provinsi dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Untuk tahun 2023 Kabupaten Karanganyar mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya, penghargaan tersebut tidak lepas dari komitmen yang baik oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar menjadi Kabupaten Layak Anak. Target skor Kabupaten Layak Anak pada Tahun 2023 sebesar 780 dan terealisasi sebesar 622,43. Saat penginputan evaluasi mandiri Kabupaten Layak Anak mencapai skor 924,8 namun setelah dilakukan verifikasi administrasi diperoleh skor 622,43. Meskipun skor yang diperoleh lebih rendah daripada tahun 2022 tetapi peringkatnya masih dalam kategori Madya. Capaian sasaran tahun 2023 sebesar 79,80% dengan capaian sasaran tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD sebesar 79,80%.



TUJUAN 5.2 :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.42

Tujuan 5.2 : *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA Th. 2021	REALISASI KINERJA Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Indeks Reformasi Birokrasi	59	62,01	80	70,91	88,64%	80	88,64%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					88,64%		88,64%

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 5.2 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan 5.2
Capaian kinerja rata-rata tujuan 5.2 tahun 2023 adalah sebesar 88,64% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”
2. Capaian kinerja IKU
Angka capaian kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sebesar 88,64% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”.
3. Analisis Pencapaian Kinerja Tujuan
Dalam pencapaian IKU Indeks Reformasi Birokrasi didukung sasaran sebagai berikut :



Tabel 3.43
Sasaran 5.2.1 : Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel, Efisien dan Efektif serta Pelayanan Yang Berkualitas

INDIKATOR SASARAN	REALISASI SASARAN Th. 2021	REALISASI SASARAN Th. 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN SASARAN Th. 2023	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Indeks SPBE	2,40	3,32	3,50	3,52	100,57	3,50	100,57
Nilai SAKIP	67	68,67	85	68,98	81,15	85	81,15
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)/ASN	68,32	68,6	70	81,83	116,90	70	116,90
IKM Kabupaten	82,17	83,2	83,2	84,5	101,56	81,67	101,56
Maturitas SPIP	2,634	2,88	3	3,138	104,60	3	104,60
Indeks Arsip	45,09	64,36	85	75,69	89,05	85	89,05
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					98,97		98,97

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 5.2.1 sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran 5.2.7

Capaian kinerja rata-rata sasaran 5.2.7 tahun 2023 adalah sebesar 98,97% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi.”

2. Capaian Kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Indeks SPBE tahun 2023 adalah sebesar 100,57% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.



- b. Angka capaian kinerja IKU Nilai SAKIP tahun 2023 adalah sebesar 81,15% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”.
 - c. Angka capaian kinerja IKU Nilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023 adalah WTP atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
 - d. Angka capaian kinerja IKU Nilai Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP)/ASN tahun 2023 adalah sebesar 116,90% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
 - e. Angka capaian kinerja IKU Nilai IKM Kabupaten tahun 2023 adalah sebesar 101,56% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
 - f. Angka capaian kinerja IKU Nilai Maturitas SPIP tahun 2023 adalah sebesar 104,60% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
 - g. Angka capaian kinerja IKU Nilai Indeks Arsip tahun 2023 adalah sebesar 89,05% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”.
3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
- a. Indeks SPBE

Pemerintah menjamin terselenggaranya pelayanan publik dan wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik yaitu : kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Nilai indeks SPBE Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 yaitu sebesar 3,52 dengan predikat Sangat Baik.

Nilai indeks tersebut meningkat dari evaluasi tahun 2022 yaitu sebesar 3,32, dan melebihi target yang ditetapkan tahun 2023. Terpenuhinya target nilai indeks SPBE tahun 2023, antara lain didukung



oleh sudah tersedianya arsitektur SPBE Nasional sebagai pedoman pengembangan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

a. Nilai SAKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dievaluasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan evaluasi untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2017 memperoleh nilai SAKIP 57,52 atau berpredikat CC, Tahun 2018 naik memperoleh nilai 62,38 atau berpredikat menjadi B, Tahun 2019 memperoleh nilai 65.02 atau predikat B, Tahun 2020 memperoleh nilai 67 atau berpredikat B, tahun 2021 memperoleh nilai 68,13 atau berpredikat B, tahun 2022 memperoleh nilai 68,67 dan tahun 2023 memperoleh nilai 68.98 dari Kementerian PAN dan RB. Penilaian ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di bandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Karanganyar sudah menunjukkan hasil baik.

Rincian penilaian tahun 2023 sebagai berikut :

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,80
2	Pengukuran Kinerja	30	18,71
3	Pelaporan Kinerja	15	10,70
4	Evaluasi Internal	25	15,77
Nilai Hasil Evaluasi		100	68,98
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B



Prestasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan *good governance* di atas tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menciptakan situasi kondusif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut. Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan situasi kondusif yang memungkinkan penyelenggara negara dan jajarannya melaksanakan tugasnya dengan baik. Lembaga negara harus memastikan berfungsinya lembaga hukum, sumber daya manusia dan perangkat hukum agar menjamin terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum melalui upaya penegakan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggung jawab.

c. Nilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berkaitan dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Karanganyar kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022, setelah 8 (delapan) tahun berturut-turut memperoleh opini yang sama pada Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Opini BPK RI atas LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum dan laporan keuangan dapat disajikan secara lengkap, bukti audit yang dibutuhkan lengkap untuk mendukung keyakinan auditor, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, penyajiannya konsisten dan bebas dari salah saji material. Dengan diraihnya Opini WTP tersebut, berdampak positif bagi pembangunan daerah dan peningkatan kepercayaan publik atas kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar.



Tantangan terbesar dalam mempertahankan opini WTP berturut-turut adalah penataan laporan keuangan dan aset. BPK menaruh perhatian besar pada administrasi keuangan yang akuntabel dan pengelolaan asset dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain mendapatkan predikat WTP oleh BPK RI, Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga selama 4 (empat) tahun berturut-turut yaitu tahun 2014-2017 mendapat predikat “Sangat Tinggi” atas nilai hasil EKPPD terhadap LPPD. Selain mendapat predikat “Sangat Tinggi”, Pemerintah Kabupaten Karanganyar meraih peringkat ke-2 secara nasional atas nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2016 dan peringkat ke-3 atas nilai hasil EKPPD terhadap LPPD tahun 2017 dan 2018 dengan nilai “Sangat Tinggi”.

Dalam penyusunan LPPD, Pemerintah Kabupaten Karanganyar sangat *concern* terhadap dua poin krusial atau *critical point*. Yakni pertama, reliabilitas data, dan kedua, validitas data. Keduanya menjadi pedoman pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat dan benar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila data yang disajikan untuk dievaluasi dalam EKPPD tidak reliabel dan valid, maka hasil evaluasinya pun akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak tepat. Karena EKPPD pada prinsipnya bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggara pemerinthaan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan dan sebagai dasar Pemerintah untuk melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas daerah. Hasil pencapaian ini, dibuktikan Kabupaten Karanganyar dengan raihan penghargaan tertinggi tingkat nasional atas pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun berupa penghargaan Parasamy Purna Karya Nugraha pada tahun 2019.



d. Indeks Profesionalisme Pegawai(IPP)/ASN

Indek Profesionalisme Pegawai (IPP) ASN pada tahun 2023 ditargetkan mendapatkan nilai 70. Hasil rilis dari Badan Kepegawaian Negara terealisasi sebesar 81,83 atau tercapai 116,90%, melebihi dari target yang ditetapkan. Komponen IPP meliputi kualifikasi pegawai, kompetensi, kinerja dan disiplin.

e. Nilai IKM

Keberhasilan peran Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pemenuhan kebutuhan warganya atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif sangat ditentukan pada tingkat kepuasan pelayanan publik yang disediakan. Salah satu bentuk pengukuran kepuasan masyarakat atas pelayanan publik adalah melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023, diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara kumulatif sebesar 84,5. Hal ini berarti IKM Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2023 berada dalam Nilai Interval (NI) IKM 3,0644-3,532 atau Nilai Interval Konversi (NIK) IKM 76,61 – 88,30, dengan kategori mutu pelayanan B (Baik).

Selanjutnya ke depan survei diharapkan sudah dilakukan pula di unit terkecil Perangkat Daerah, seperti Kelurahan dan UPT Dinas. Sehingga, hasil survei lebih menyeluruh dan dapat dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

f. Nilai Maturitas SPIP

Berdasarkan laporan hasil penilaian baseline maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (berkembang) dengan nilai 3,138. Hasil penilaian tersebut diperoleh dari hasil penilaian 3 komponen yaitu penetapan tujuan, struktur dan proses penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi.



g. Nilai Indeks Arsip

Untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dalam mewujudkan misi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar (Misi 5) Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga Tolak ukur capaiannya Tercapainya Pemerintahan yang Akuntabel, Efisien dan Efektif serta Pelayanan yang Berkualitas terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kunci di RPJMD yang terkait dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Karanganyar yaitu : Indeks Arsip.

Capaian Index Arsip tahun 2023 dengan **kategori SANGAT BAIK, dengan nilai 75,69, meningkat dari tahun 2022 dengan nilai 64,36.**

Peningkatan nilai didukung oleh faktor:

- a. Terpenuhinya pembangunan Depot Arsip Kabupaten Karanganyar
- b. Telah dilaksanakannya sosialisasi ke seluruh Perangkat Daerah dengan Kebijakan Tata Naskah Dinas dan Peraturan Bupati tentang SKKAAD, Klasifikasi Arsip, JRA, Fasilitatif dan Substantif program Arsip Vital, Perangkat Daerah juga telah mendapatkan sosialisasi terkait Kebijakan Pengorganisasian Kearsipan.
- c. Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan kearsipan ke seluruh Perangkat Daerah, BUMD dan Ormas/Orpol.
- d. Telah melaksanakan akusisi arsip sebanyak 5x dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2019,2020,2021,2022 dan 2023.
- e. Telah dilaksanakannya digitalisasi arsip pada 15 Kelurahan di Kabupaten Karanganyar.
- f. Telah dilaksanakan pemusnahan arsip pada 4 Perangkat Daerah.
Implementasi penggunaan Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) pada seluruh Perangkat Daerah.

Dan yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah faktor pembinaan Arsip Terjaga yang perlu mendapatkan perhatian serius.

4. Efisiensi penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan sumber anggaran dalam pencapaian tujuan 5.1. dan 5.2 antara lain dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target. Berikut ini adalah tabel efisiensi penggunaan anggaran pencapaian tujuan 5.1. dan 5.2



Tabel 3.44
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pencapaian Tujuan 5.1. dan 5.2

Misi 5 : Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan Olahraga						
Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi dan kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	14.934.135.450,00	14.745.341.500,00	98,74	1,26
	jumlah		14.934.135.450,00	14.745.341.500,00	98,74	1,26
	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	Program Pembinaan Sejarah	40.000.000,00	39.672.500,00	99,18	0,82
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	2.554.380.000,00	2.541.895.000,00	99,51	0,49
	jumlah		2.594.380.000,00	2.581.567.500,00	99,51	0,49
	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	16.016.900.000,00	15.977.264.040,00	99,75	0,25
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.018.380.000,00	1.903.113.980,00	94,29	5,71
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	100,00	0,00
	jumlah		19.205.280.000,00	19.050.378.020,00	99,19	0,81
	Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan perlindungan anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	105.000.000,00	70.845.800,00	67,47	32,53
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		445.640.000,00	430.915.521,00	96,70	3,30	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga		5.158.400.000,00	5.123.796.000,00	99,33	0,67	
Program Perlindungan Khusus Anak		35.000.000,00	27.990.000,00	79,97	20,03	
Program Perlindungan Perempuan		7.831.183.300,00	7.284.161.239,00	93,01	6,99	
jumlah		7.866.183.300,00	7.312.151.239,00	92,96	7,04	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien serta pelayanan yang berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.340.591.036.963,00	1.272.363.212.873,00	94,91	5,09
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	4.413.825.000,00	4.220.253.267,00	95,61	4,39
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.109.320.000,00	1.055.417.300,00	95,14	4,86
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	24.849.928.975,00	23.167.864.903,00	93,23	6,77
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.267.725.000,00	1.872.260.020,00	82,56	17,44
jumlah		1.373.231.835.938,00	1.302.679.008.363,00	94,86	5,14	

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan capaian kinerja

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian tujuan 5.1 dan 5.2, sebagaimana tabel 3.45.



Tabel 3.45

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi dan kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman	99,01	98,74	1,26
	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	106,11	99,51	0,49
	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	82,87	99,19	0,81
	Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan perlindungan anak	89,06	92,96	7,04
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien serta pelayanan yang berkualitas	98,97	94,86	5,14

Berdasarkan tabel 3.45 tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan 5.1 dan 5.2 dengan capaian sasaran kinerja rata-rata melebihi 90%, dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.



3.2 AKUNTABILITAS ANGGARAN

APBD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui KUA dan PPAS yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Karanganyar, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan daerah. RKPD kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang disusun dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan :

1. aspirasi masyarakat;
2. kinerja pemerintah daerah sebelumnya;
3. perkembangan dan arah kebijakan ekonomi nasional;
4. potensi daerah.

Guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2023 dengan memperhatikan RPJMN 2020-2024 serta arah kebijakan dan isu strategis RKP 2023 guna mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional. Adapun 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2023 dimaksud, meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan publik.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2023 diprioritaskan pada :



1. Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas, dengan rangkaian kebijakan :
 - a) Pengembangan industri pertanian/peternakan/perikanan modern ramah lingkungan dan cerdas (Smart agriculture) untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan swasembada;
 - b) Pengembangan jaringan pariwisata secara cerdas dan saling terhubung multisektor (Smart tourism & sustainable tourism);
 - c) Penguatan kapasitas kewirausahaan dan jejaring UMKM, termasuk masyarakat desa dan BUMDesa dan menuju Smart Ekonomi;
 - d) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk pengembangan e-commerce, termasuk di seluruh desa;
 - e) Penguatan perilaku inovatif dan wawasan ekonomi berkelanjutan di masyarakat (tidak merusak lingkungan, menjaga keragaman hayati, variasi pola pangan)
2. Penguatan kebijakan Fasilitas dan Koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif, dengan rangkaian kebijakan :
 - a) Peningkatan ketertiban, pengelolaan administrasi pemerintahan desa;
 - b) Pengembangan jalan, jembatan, dan jaringan teknologi informasi berbasis internet di semua desa;
 - c) Penguatan inovasi desa dan BUMDesa sesuai keunggulan potensinya : desa wisata, desa industri, desa lumbung pangan, desa seni, desa sayur dan buah, kampung ternak, dan sebagainya;
 - d) Pemasyarakatan desa berwawasan lingkungan berkelanjutan dan tanggap bencana.
3. Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan, dengan kebijakan umum:
 - a) Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana;
 - b) Pengembangan kerjasama pemerintah bersama dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;



c) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu:

- (1) infrastruktur ekonomi wilayah;
- (2) infrastruktur sosial budaya (fasilitas seni budaya, fasilitas olah raga, panti sosial, fasilitas keagamaan);

Struktur APBD sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Tidak ada lagi klasifikasi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Dasar hukum penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023.
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023.

2.2.1. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk :

1. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui :
 - a. Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, penambahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuan perangkat keras di pos-pos pelayanan Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
 - b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan retribusi;



- c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - d. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja;
 - f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
 - g. Pengkajian obyek-obyek baru yang belum tertuang dalam Perda pajak dan retribusi;
 - h. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif.
2. Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan;
 3. Meningkatkan kontribusi BUMD/Perusda dengan upaya pengelolaan peningkatan profesionalisme BUMD/Perusda serta memperkuat BUMD/Perusda;
 4. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan aset-aset daerah pada SKPD untuk peningkatan Pendapatan Daerah;
 5. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
- . Tabel berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar selama 2 (dua) tahun berturut-turut :

Tabel 3.46
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023-2022

Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN - LRA	2.232.170.487.885,00	2.255.233.786.402,00	2.198.761.513.542,00	2.251.537.341.148,05
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	406.337.151.885,00	441.806.235.537,00	438.373.541.542,00	511.734.454.173,05
Pajak Daerah – LRA	205.946.600.000,00	235.835.863.168,00	190.150.000.000,00	225.008.130.128,00
Retribusi Daerah – LRA	9.522.760.800,00	10.329.283.857,00	7.221.662.000,00	8.653.396.564,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	18.831.712.806,00	19.207.774.395,00	18.096.123.000,00	18.096.196.748,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	172.036.078.279,00	176.433.314.117,00	222.905.756.542,00	259.976.730.733,05
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	1.818.623.336.000,00	1.806.777.550.865,00	1.752.452.972.000,00	1.731.961.886.975,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	1.628.670.142.000,00	1.610.778.999.134,00	1.594.244.778.000,00	1.541.982.025.975,00
Dana Perimbangan – LRA	1.436.682.398.000,00	1.424.682.138.634,00	1.401.963.130.000,00	1.349.700.295.975,00
Dana Insentif Daerah (DID) – LRA	11.781.767.000,00	5.890.883.500,00	22.407.052.000,00	22.407.052.000,00
Dana Desa - LRA	180.205.977.000,00	180.205.977.000,00	169.874.596.000,00	169.874.596.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	189.953.194.000,00	195.998.551.731,00	158.208.194.000,00	189.979.861.000,00



Pendapatan Bagi Hasil – LRA	177.533.194.000,00	184.436.831.731,00	142.533.194.000,00	177.559.691.000,00
Bantuan Keuangan – LRA	12.420.000.000,00	11.561.720.000,00	15.675.000.000,00	12.420.170.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	7.210.000.000,00	6.650.000.000,00	7.935.000.000,00	7.841.000.000,00
Pendapatan Hibah – LRA	7.210.000.000,00	6.650.000.000,00	7.935.000.000,00	7.841.000.000,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Tabel 3.47
Perbandingan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	Realisasi	Realisasi		
PENDAPATAN – LRA	2.255.233.786.402,00	2.251.537.341.148,05	3.696.445.253,95	0,16
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	441.806.235.537,00	511.734.454.173,05	(69.928.218.636,05)	(13,66)
Pajak Daerah – LRA	235.835.863.168,00	225.008.130.128,00	10.827.733.040,00	4,81
Retribusi Daerah – LRA	10.329.283.857,00	8.653.396.564,00	1.675.887.293,00	19,37
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	19.207.774.395,00	18.096.196.748,00	1.111.577.647,00	6,14
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	176.433.314.117,00	259.976.730.733,05	(83.543.416.616,05)	(32,13)
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	1.806.777.550.865,00	1.731.961.886.975,00	74.815.663.890,00	4,32
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	1.610.778.999.134,00	1.541.982.025.975,00	68.796.973.159,00	4,46
Dana Perimbangan – LRA	1.424.682.138.634,00	1.349.700.295.975,00	74.981.842.659,00	5,56
Dana Insentif Daerah (DID) – LRA	5.890.883.500,00	22.407.052.000,00	(16.516.168.500,00)	(73,71)
Dana Desa - LRA	180.205.977.000,00	169.874.596.000,00	10.331.381.000,00	6,08
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	195.998.551.731,00	189.979.861.000,00	6.018.690.731,00	3,17
Pendapatan Bagi Hasil - LRA	184.436.831.731,00	177.559.691.000,00	6.877.140.731,00	3,87
Bantuan Keuangan - LRA	11.561.720.000,00	12.420.170.000,00	(858.450.000,00)	(6,91)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	6.650.000.000,00	7.841.000.000,00	(1.191.000.000,00)	(15,19)
Pendapatan Hibah - LRA	6.650.000.000,00	7.841.000.000,00	(1.191.000.000,00)	(15,19)

Berdasarkan tabel 3.35 dan 3.36 realisasi pendapatan daerah tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp3.696.445.253,95 atau 0,16% dibandingkan realisasi pendapatan daerah Tahun 2022. Pendapatan retribusi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.675.887.293,00 atau 19,37% dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi tahun 2022. Sedangkan penurunan realisasi pendapatan daerah yang paling signifikan terdapat pada lain-lain pendapatan asli daerah sebesar Rp83.543.416.616,05 atau 32,13% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.

1. Permasalahan Bidang Pendapatan

Permasalahan Umum dalam Pendapatan Daerah, khususnya dalam hal Pendapatan Asli Daerah adalah :



- a. Miskinnya Sumber Daya Alam.
- b. Adanya beberapa aset / obyek Pendapatan Asli Daerah yang belum diserahkan sepenuhnya ke Kabupaten Karanganyar;
- c. Kesadaran para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah masih belum sesuai harapan kita;
- d. Situasi dan kondisi negara yang berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri yang selanjutnya akan berdampak terhadap kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi;
- e. Penentuan besarnya Alokasi Dana Perimbangan menjadi kewenangan Pemerintah Atasan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi.

2. Pemecahan Masalah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah supaya tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
- c. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan.
- d. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyertaan modal atau investasi.
- e. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan jalan :

1. Mengadakan rapat koordinasi pendapatan daerah secara berkala, agar dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicari jalan keluarnya;



2. Mengadakan pemantauan terhadap perkembangan masing-masing sumber pendapatan secara berkesinambungan untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan yang kontribusinya cukup besar dan masih dapat untuk ditingkatkan;
3. Mengadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah di bidang Pendapatan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
4. Menyusun Peraturan Daerah yang baru disesuaikan dengan potensi dan kewenangan daerah;
5. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pendapatan untuk menghindari adanya kebocoran penerimaan pendapatan daerah;
6. Menggiatkan penyuluhan-penyuluhan untuk menjadikan masyarakat lebih mengetahui kewajibannya sejalan dengan kebutuhan dana bagi Pemerintah;
7. Mendorong Penguatan Modal Usaha, Penyehatan dan Peningkatan Kinerja BUMD;
8. Pemanfaatan peluang melalui kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Dalam rangka penyusunan Belanja Daerah, agar pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia maka Pemerintah daerah menetapkan kebijakan umum anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Belanja Daerah dilakukan dengan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah dan memenuhi tuntutan dan kebutuhan publik;
2. Belanja daerah untuk memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
3. Belanja daerah untuk mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);



4. Penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan pendapatan daerah serta memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
5. Belanja daerah yang dialokasikan kepada Perangkat Daerah didasarkan pada standar satuan harga (terutama dalam pengadaan barang dan jasa). Selain itu dipertimbangkan pula aspek deviasi unit harga satuan dalam setiap tahunnya serta merumuskan arah kebijakan untuk harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa;
6. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah (desa dan kelurahan) melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa atau Dana Kelurahan yang diarahkan untuk peningkatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Belanja Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektif, ekonomis, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Arah kebijakan anggaran belanja Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pengelolaan Belanja Daerah dilakukan dengan prinsip Anggaran Berbasis Prestasi Kerja untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan publik, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik;
2. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar satuan harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
3. Penganggaran untuk gaji dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemberian gaji ketiga belas maupun Tunjangan Hari Raya sebesar satu kali gaji.



Disamping itu dianggarkan biaya penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD;

4. Penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintah Desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK);
6. Penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan;
7. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN;
8. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud;
9. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar dan sejenis lainnya dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;
10. Penganggaran belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.



Disamping itu belanja modal dianggarkan sebesar harga beli/bangunan asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan;

11. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Khusus penganggaran pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Pengelolaan belanja daerah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai validasi rencana belanja daerah yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya;
13. Penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan pendapatan daerah serta memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan melihat kapasitas serta substansi belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung secara komprehensif;
14. Penyusunan belanja daerah yang diproyeksikan kepada masing-masing SKPD didasarkan pada standar harga satuan (terutama dalam pengadaan barang dan jasa) melalui analisis berdasarkan pada tingkat inflasi dan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi beban keuangan daerah. Selain itu dipertimbangkan pula aspek deviasi unit harga satuan dalam setiap tahunnya serta merumuskan arah kebijakan untuk unit harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa;



15. Belanja daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip efisien, efektif, ekonomis, transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun target dan realisasi dari belanja langsung dan tidak langsung Kabupaten Karanganyar dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut,

Tabel 3.48
Realisasi Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 – 2022

Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	2.405.702.831.778,00	2.299.195.046.467,00	2.334.686.563.357,00	2.203.430.151.176,00
BELANJA OPERASI	1.758.721.053.077,00	1.673.035.410.311,00	1.688.850.417.051,00	1.590.938.004.729,00
Belanja Pegawai	1.008.682.364.483,00	957.879.263.716,00	1.009.925.152.305,00	953.878.284.210,00
Belanja Barang dan Jasa	620.225.842.771,00	587.494.693.838,00	577.021.708.026,00	543.169.427.462,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	500.000.000,00	389.705.074,00
Belanja Hibah	123.716.178.923,00	121.687.378.115,00	88.104.590.920,00	83.224.021.300,00
Belanja Bantuan Sosial	6.096.666.900,00	5.974.074.642,00	13.298.965.800,00	10.276.566.683,00
BELANJA MODAL	274.016.869.221,00	253.727.694.797,00	283.543.216.106,00	253.014.014.897,00
Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	722.350.230,00	295.000.000,00	276.392.400
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.998.023.826,00	57.323.831.226,00	99.403.965.116,00	93.866.393.058,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.826.583.000,00	110.570.961.071,00	112.433.090.000,00	97.226.667.698,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	64.317.117.200,00	56.325.661.835,00	51.550.714.000,00	41.999.788.425,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.700.145.195,00	28.612.040.435,00	19.860.446.990,00	19.644.773.316,00
Belanja Modal Aset Lainnya	175.000.000,00	172.850.000,00	0,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	2.550.000.000,00	2.067.038.879,00	5.000.000.000,00	2.840.201.350,00
Belanja Tak Terduga	2.550.000.000,00	2.067.038.879,00	5.000.000.000,00	2.840.201.350,00
BELANJA TRANSFER	370.414.909.480,00	370.364.902.480,00	357.292.930.200,00	356.637.930.200,00
Belanja bagi hasil	21.566.767.080,00	21.566.767.080,00	20.016.732.800,00	20.016.732.800,00
Transfer Bantuan Keuangan	348.848.142.400,00	348.798.135.400,00	337.276.197.400,00	336.621.197.400,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Tabel 3. 49
Perbandingan Belanja Daerah Tahun 2023 – 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	Realisasi	Realisasi		
BELANJA DAERAH	2.299.195.046.467,00	2.203.430.151.176,00	95.764.895.291,00	4,35
BELANJA OPERASI	1.673.035.410.311,00	1.590.938.004.729,00	82.097.405.582,00	5,16
Belanja Pegawai	957.879.263.716,00	953.878.284.210,00	4.000.979.506,00	0,42
Belanja Barang dan Jasa	587.494.693.838,00	543.169.427.462,00	44.325.266.376,00	8,16
Belanja Bunga	0,00	389.705.074,00	(389.705.074,00)	(100,00)
Belanja Hibah	121.687.378.115,00	83.224.021.300,00	38.463.356.815,00	46,22
Belanja Bantuan Sosial	5.974.074.642,00	10.276.566.683,00	(4.302.492.041,00)	(41,87)



Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	Realisasi	Realisasi		
BELANJA MODAL	253.727.694.797,00	253.014.014.897,00	713.679.900,00	0,28
Belanja Modal Tanah	722.350.230,00	276.392.400	445.957.830,00	161,35
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.323.831.226,00	93.866.393.058,00	(36.542.561.832,00)	(38,93)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110.570.961.071,00	97.226.667.698,00	13.344.293.373,00	13,72
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.325.661.835,00	41.999.788.425,00	14.325.873.410,00	34,11
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.612.040.435,00	19.644.773.316,00	8.967.267.119,00	45,65
Belanja Modal Aset Lainnya	172.850.000,00	0,00	172.850.000,00	-
BELANJA TAK TERDUGA	2.067.038.879,00	2.840.201.350,00	(773.162.471,00)	(27,22)
Belanja Tak Terduga	2.067.038.879,00	2.840.201.350,00	(773.162.471,00)	(27,22)
BELANJA TRANSFER	370.364.902.480,00	356.637.930.200,00	13.726.972.280,00	3,85
Belanja bagi hasil	21.566.767.080,00	20.016.732.800,00	1.550.034.280,00	7,74
Transfer Bantuan Keuangan	348.798.135.400,00	336.621.197.400,00	12.176.938.000,00	3,62

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.37 dan 3.38 realisasi belanja daerah tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp95.764.895.291,00 dibandingkan belanja daerah tahun Anggaran 2022. Realisasi belanja modal tanah mengalami kenaikan sebesar Rp445.957.830,00 dibandingkan dengan realisasi belanja modal tanah tahun 2022. Sedangkan realisasi belanja modal Peralatan mesin mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar Rp36.542.561.832,00 dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan mesin tahun 2022.

2.2.2. Pembiayaan Daerah

a. Kebijakan Umum Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Anggaran pembiayaan *netto* yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan anggaran yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah.

Arah kebijakan umum pembiayaan yaitu adanya peningkatan pendapatan daerah dan penghematan belanja daerah diharapkan terjadi surplus, jika setiap tahun terjadi surplus anggaran diharapkan penyertaan



modal daerah setiap tahunnya selalu meningkat dan sisa lebih tahun anggaran dipergunakan untuk memperkuat posisi Kas Daerah.

Penerimaan pembiayaan yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman, Arah dan Kebijakan Umum pembiayaan daerah diharapkan untuk bisa surplus, apabila terjadi surplus anggaran maka diharapkan penyertaan modal daerah dapat ditingkatkan disamping itu posisi kas daerah akan terjamin atau likuid.

Dalam penganggarannya Pembiayaan daerah dianggarkan dalam dua bagian yaitu :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun padatahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup antara lain : sisa lebih perhitungananggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan danacadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, mencakup antara lain : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan sebagai imbalan atas diterimanya utang serta, perlu disesuaikan kembali pemberian pinjaman kepada masyarakat. Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan yang semakin besar menunjukkan defisit APBD yang semakin besar pula.

Kondisi pembiayaan APBD Kabupaten Karanganyar selama 2 (dua) tahun terakhir ini adalah sebagai berikut:



Tabel 3.50
Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 - 2022

URAIAN	Tahun 2023		Tahun 2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	184.282.573.893,00	184.418.202.893,00	175.425.049.815,00	175.629.729.814,95
Penggunaan SiLPA	184.282.573.893,00	184.335.562.893,00	175.425.049.815,00	175.425.049.814,95
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	82.640.000,00	0,00	204.680.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.750.230.000,00	10.750.230.000,00	39.500.000.000,00	39.457.159.600,00
Penyertaan Modal Daerah	10.750.230.000,00	10.750.230.000,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo	0,00	0,00	28.500.000.000,00	28.457.159.600,00
PEMBIAYAAN NETTO	173.532.343.893,00	173.667.972.893,00	135.925.049.815,00	136.172.570.214,95

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Tabel 3.51
Kondisi pembiayaan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 – 2022

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	kenaikan/ (Penurunan)	%
	Realisasi	Realisasi		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	184.418.202.893,00	175.629.729.814,95	8.788.473.078,05	5,00
Penggunaan SiLPA	184.335.562.893,00	175.425.049.815,00	8.910.513.078,00	5,08
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	82.640.000,00	204.680.000,00	(122.040.000,00)	(59,62)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.750.230.000,00	39.457.159.600,00	(28.706.929.600,00)	(72,75)
Penyertaan Modal Daerah	10.750.230.000,00	11.000.000.000,00	(249.770.000,00)	(2,27)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo	0,00	28.457.159.600,00	(28.457.159.600,00)	(100,00)
PEMBIAYAAN NETTO	173.667.972.893,00	136.172.570.214,95	37.495.402.678,05	27,54

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Tabel 3.52
**Realisasi Anggaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2023
untuk Melaksanakan Sasaran Strategis**

Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Efisiensi
Misi 1: Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh						
Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.458.743.500,00	4.349.022.326,00	97,54	2,46
		Program Penyelenggaraan Jalan	74.521.422.628,00	66.257.061.753,00	88,91	11,09
		Jumlah	78.980.166.128,00	70.606.084.079,00	89,40	10,60
	Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana	Program Penanggulangan Bencana	2.634.910.500,00	2.564.619.429,00	97,33	2,67
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.088.914.000,00	1.087.482.300,00	99,87	0,13
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.794.988.200,00	5.329.537.900,00	91,97	8,03
		Jumlah	9.518.812.700,00	8.981.639.629,00	94,36	5,64
	Meningkatnya pemukiman yang	Program Penataan Bangunan Gedung	8.203.675.000,00	8.098.414.429,00	98,72	1,28



Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Efisiensi	
	tertata	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	940.960.000,00	732.626.733,00	77,86	22,14	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	800.000.000,00	782.596.000,00	97,82	2,18	
			Jumlah	9.944.635.000,00	9.613.637.162,00	96,67	3,33
	Meningkatnya infrastruktur public		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100.840.000,00	97.977.500,00	97,16	2,84
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15.292.144.000,00	14.215.446.876,00	92,96	7,04
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	9.563.927.811,00	7.832.961.799,00	81,90	18,10
			Jumlah	24.956.911.811,00	22.146.386.175,00	88,74	11,26
	Meningkatnya infrastruktur pendukung perekonomian daerah		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	510.000.000,00	505.595.220,00	99,14	0,86
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	618.000.000,00	545.914.314,00	88,34	11,66
			Jumlah	1.128.000.000,00	1.051.509.534,00	93,22	6,78
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	128.000.000,00	125.245.650,00	97,85	2,15
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	23.000.000,00	22.997.150,00	99,99	0,01
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	125.000.000,00	121.707.250,00	97,37	2,63
			Program Pengelolaan Persampahan	5.409.518.000,00	5.349.950.542,00	98,90	1,10
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	100.000.000,00	99.984.956,00	99,98	0,02
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.098.788.000,00	1.092.336.800,00	99,41	0,59	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	23.000.000,00	19.768.900,00	85,95	14,05	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	168.500.000,00	166.913.300,00	99,06	0,94	
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	600.000.000,00	514.594.200,00	85,77	14,23	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.016.204.067,00	7.951.814.631,00	99,20	0,80	
		Jumlah	15.692.010.067,00	15.465.313.379,00	98,56	1,44	
Misi 2: Pemberdayaan Perekonomian rakyat							
Meningkatnya produktifitas ekonomi dan daya saing daerah	Meningkatnya produktifitas sektor pertanian dan perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.208.917.500,00	3.208.917.500,00	100,00	0,00	
		Program Penyuluhan Pertanian	441.250.000,00	441.155.000,00	99,98	0,02	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	10.793.800.700,00	10.704.083.847,00	99,17	0,83	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	808.075.000,00	804.263.500,00	99,53	0,47	
			Jumlah	15.252.043.200,00	15.158.419.847,00	99,39	0,61
	meningkatkan produktifitas sektor perdagangan		Program Hubungan Industrial	221.961.100,00	214.923.998,00	96,83	3,17
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	409.404.000,00	406.116.000,00	99,20	0,80
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	42.736.000,00	40.475.904,00	94,71	5,29	



Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Efisiensi	
		Program Pengembangan Umkm	3.630.000.000,00	3.589.890.000,00	98,90	1,10	
		Jumlah	4.304.101.100,00	4.251.405.902,00	98,78	1,22	
	Meningkatnya produktifitas sektor industri pengolahan		Program Pengawasan Keamanan Pangan	55.000.000,00	53.500.000,00	97,27	2,73
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	30000000	29966800	99,89	0,11
			Jumlah	85.000.000,00	83.466.800,00	98,20	1,80
	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.714.394.500,00	3.714.394.500,00	100,00	0,00
			Program Penempatan Tenaga Kerja	160.093.200,00	155.857.200,00	97,35	2,65
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	646.183.600,00	631.369.125,00	97,71	2,29
			Jumlah	4.520.671.300,00	4.501.620.825,00	99,58	0,42
	meningkatkan nilai investasi daerah		Program Pelayanan Penanaman Modal	475.000.000,00	463.212.800,00	97,52	2,48
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	5.000.000,00	4.980.000,00	99,60	0,40
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	386.000.000,00	357.961.700,00	92,74	7,26
			Jumlah	871.000.000,00	831.154.500,00	95,43	4,57
	Misi 3 : Pendidikan gratis SD/SMP dan kesehatan gratis						
Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	199.967.994.624,00	195.460.603.907,00	97,75	2,25	
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.000.000,00	38.210.000,00	90,98	9,02	
		Jumlah	200.009.994.624,00	195.498.813.907,00	97,74	2,26	
	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	919.377.000,00	904.236.000,00	98,35	1,65
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	75.364.945.600,00	64.033.169.575,00	84,96	15,04
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.462.852.000,00	4.094.089.608,00	91,74	8,26
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	666.639.100,00	657.346.882,00	98,61	1,39
			Jumlah	81.413.813.700,00	69.688.842.065,00	85,60	14,40
	Misi 4 : Pembangunan Desa sebagai Pusat pertumbuhan						
	Terwujudnya pemerataan antar desa	meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	7.217.568.900,00	6.942.383.147,00	96,19	3,81
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat			9.265.473.300,00	9.224.535.690,00	99,56	0,44	
Program Penataan Desa			203.300.800,00	201.764.300,00	99,24	0,76	
Program Peningkatan Kerja Sama Desa			160.000.000,00	159.657.600,00	99,79	0,21	
Jumlah			16.846.343.000,00	16.528.340.737,00	98,11	1,89	
Misi 5 : Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan Olahraga							
Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi dan kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	14.934.135.450,00	14.745.341.500,00	98,74	1,26	
		jumlah	14.934.135.450,00	14.745.341.500,00	98,74	1,26	
	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan		Program Pembinaan Sejarah	40.000.000,00	39.672.500,00	99,18	0,82
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	2.554.380.000,00	2.541.895.000,00	99,51	0,49
			jumlah	2.594.380.000,00	2.581.567.500,00	99,51	0,49
	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	16.016.900.000,00	15.977.264.040,00	99,75	0,25
			Program Pengembangan	2.018.380.000,00	1.903.113.980,00	94,29	5,71



Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Efisiensi	
		Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	100,00	0,00	
			jumlah	19.205.280.000,00	19.050.378.020,00	99,19	0,81
	Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan perlindungan anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	105.000.000,00	70.845.800,00	67,47	32,53	
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	445.640.000,00	430.915.521,00	96,70	3,30	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	5.158.400.000,00	5.123.796.000,00	99,33	0,67	
		Program Perlindungan Khusus Anak	35.000.000,00	27.990.000,00	79,97	20,03	
		Program Perlindungan Perempuan	7.831.183.300,00	7.284.161.239,00	93,01	6,99	
			jumlah	7.866.183.300,00	7.312.151.239,00	92,96	7,04
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien serta pelayanan yang berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.340.591.036.963,00	1.272.363.212.873,00	94,91	5,09
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat			4.413.825.000,00	4.220.253.267,00	95,61	4,39	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya			1.109.320.000,00	1.055.417.300,00	95,14	4,86	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD			24.849.928.975,00	23.167.864.903,00	93,23	6,77	
Program Penyelenggaraan Pengawasan			2.267.725.000,00	1.872.260.020,00	82,56	17,44	
		jumlah	1.373.231.835.938,00	1.302.679.008.363,00	94,86	5,14	